

Lampiran II Peraturan Bupati Lamongan
Nomor : 43 Tahun 2016
Tanggal : 4 Oktober 2016

BAB I

PENDAHULUAN

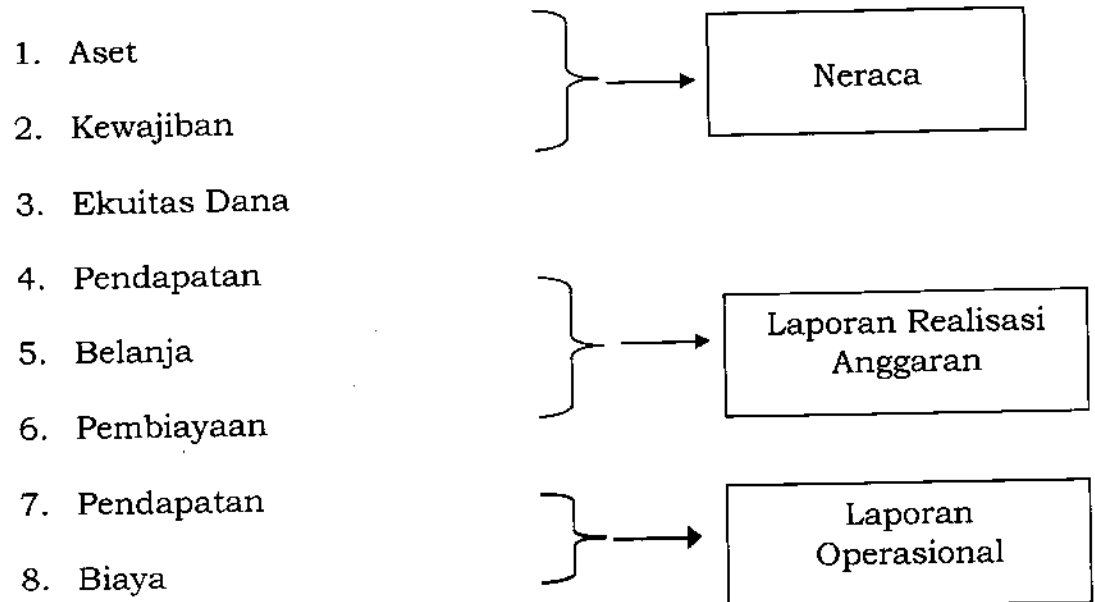
A. Bagan Akun

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya di bidang keuangan, meliputi transaksi keuangan yang mencakup sumber daya, pendapatan dan beban, maka diperlukan sarana dalam bentuk laporan keuangan. Untuk dapat menyajikan transaksi keuangan dalam bentuk laporan keuangan perlu dilakukan pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran terhadap transaksi keuangan tersebut. Agar transaksi keuangan dapat dicatat dan dikelompokkan dengan tertib dan seragam perlu ditetapkan bagan akun dan kode akun. Bagan Akun dan Kode Akun yang digunakan oleh RSUD yang telah menerapkan PPK BLUD disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana digunakan oleh Pemerintah Daerah. Apabila dikemudian hari Pemerintah Daerah mengubah dasar hukum pembukuannya, maka terhadap pedoman ini akan dilakukan penyesuaian

Kode Akun Laporan Realisasi Anggaran diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

B. Sistem Penomoran Bagan Akun

Bagan Akun Rumah Sakit diklasifikasi berdasarkan laporan keuangan adalah sebagai berikut :



Bagan akun dan kode akun disusun secara sistematis berdasarkan struktur, kelompok, jenis/pos, obyek dan rincian obyek, sebagai berikut :

- a. Struktur laporan keuangan, merupakan klasifikasi menurut kelompok besar karakteristik ekonomisnya, yaitu
 1. Aset
 2. Kewajiban
 3. Ekuitas
 4. Pendapatan
 5. Beban
 7. Pendapatan Operasional
 8. Beban Operasional
- b. Kelompok, merupakan klasifikasi yang menggambarkan pos-pos yang memiliki karakteristik ekonomis sejenis, misal aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan sebagainya
- c. Jenis/pos, merupakan klasifikasi yang menggambarkan sub-klasifikasi yang memiliki sifat dan fungsi sejenis

- d. Obyek/akun, merupakan sub-klasifikasi dari pos-pos/jenis yang terdapat dalam laporan keuangan. Akun ini biasanya tidak muncul dalam tabulasi komponen laporan keuangan.
- e. Rincian obyek/sub akun, merupakan rincian dari akun

Adapun sistem penomoran kode akun, sebagai berikut :

x	x	x	xx	xx	Uraian
					Kode Struktur
					Kode Kelompok
					Kode Jenis
					Kode Obyek
					Kode Rincian Obyek

1. Digit **pertama** menggambarkan klasifikasi **unsur/struktur** laporan keuangan Neraca:

- 1. Aset
- 2. Kewajiban
- 3. Ekuitas

Laporan Realisasi Anggaran

- 4. Pendapatan
- 5. Belanja

Laporan Operasional

- 7. Pendapatan
- 8. Beban

2. Digit **kedua** menggambarkan **kelompok pos** laporan keuangan, misal :

- 1 Aset
 - 1.1 Aset lancar
 - 1.2 Investasi jangka Panjang
 - 1.3 Aset Tetap
 - 1.4 Dst.....

3. Digit **ketiga** menggambarkan klasifikasi **jenis /pos** laporan keuangan

- 1 Aset
 - 1.1 Aset lancar
 - 1,1,1 Kas dan Setara Kas
 - 1,1,2 Investasi Jjangka Pendek
 - 1.1.3 Piutang
 - 1.1.4 Persediaan

4. Digit **keempat** menggambarkan klasifikasi **obyek/akun** laporan keuangan, misal

- 1 Aset
- 1.1 Aset lancar
- 1,1,1 Kas dan Setara Kas
- 1.1.1.1 Kas di Kas Daerah
- 1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan
- 1.1.1.3 Dst.....

5. Digit **kelima** menggambarkan klasifikasi **rincian obyek/sub-akun** laporan keuangan

- 1. Aset
- lancar
- 1.1.4
- Piutang
- 1,1,4,1 Piutang
- Usaha
- 1.1.4.1.1 Piutang
- BPJS 1.1.4.1.1
- Piutang .
- 1.1.4.1.1.dst.....

Untuk memudahkan menggunakan Kode Akun secara tepat, diperlukan penjelasan penggunaan Akun secara terinci. Berikut ini diuraikan penjelasan masing-masing Akun dengan sistematika sebagai berikut: nama Akun/kode Akun, definisi, saldo normal, dan keterangan yang berkaitan.

Bagan akun disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam penerapannya dimungkinkan untuk menambah kode akun sesuai kondisi di lapangan.

BAB II

AKUN NERACA

Akun neraca terdiri dari kelompok akun yang digunakan untuk mencatat semua transaksi aset, kewajiban dan ekuitas.

Akun Aset

Akun aset digunakan untuk mencatat aset atau kekayaan milik rumah sakit yang terdiri dari atas aset lancar, aset tetap dan aset lainnya

1) Aset Lancar

Pengertian : Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas dalam satu periode akuntansi dan memenuhi salah satu kriteria berikut :

- (1) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
- (2) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.
- (3) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan.

Saldo Normal : Debet

Keterangan : Aset lancar terdiri atas: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, biaya dibayar dimuka.

Kas dan Setara**Kas** : 1.1.1

Pengertian : Kas dan Setara Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD.

Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan simpanan bank (*giro*).

Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.

Saldo Normal : Debet

Keterangan : Terdiri atas

- Kas Tunai
- Rekening Giro
- Tabungan
- Deposito berjangka sampai dengan tiga bulan

Investasi Jangka Pendek : 1.1.2

Pengertian : Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka waktu 3 sampai 12 bulan.

Saldo Normal : Debet

Keterangan : Investasi jangka pendek antara lain terdiri dari saham, obligasi, dan deposito jangka waktu 3 bulan sampai 12 bulan.

Piutang	: 1.1.3
Pengertian	: Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
Keterangan	: Piutang terdiri atas antara lain piutang BPJS, Piutang, Piutang Jamkesda, Piutang Kerjasama
Saldo Normal	: Debet
 Piutang Lain-Lain	 : 1.1.4
Pengertian	: Merupakan piutang yang timbul bukan dari penyerahan jasa layanan kesehatan.
Saldo Normal	: Debet
Keterangan	: Terdiri atas piutang tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi.
 Persediaan	 : 1.1.5
Pengertian	: Persediaan adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam proses pemberian jasa layanan kesehatan yang habis dipakai atau dijual dalam satu periode akuntansi.
Saldo Normal	: Debet
Keterangan	: Terdiri atas Alat Tulis Kantor (termasuk barang cetakan), Alat Listrik, Material/Bahan (yaitu : persediaan obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan makanan pokok dan

bahan/alat kebersihan habis pakai),
Benda Pos, Bahan Bakar.

Biaya Dibayar Dimuka : 1.1.6

Pengertian : Biaya Dibayar Dimuka adalah penurunan asset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.

Saldo Normal : Debet

Keterangan : Sewa dibayar dimuka.

Cadangan Penyisihan Piutang : 1.1.4.07.99

Pengertian : Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian karena adanya piutang yang tidak tertagih, perlu dibentuk cadangan penyisihan piutang. Besarnya cadangan penyisihan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang dianut oleh BLUD.

Saldo Normal : Kredit

Keterangan : Terdiri atas penyisihan piutang usaha.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap : 1.3.7

Pengertian : Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu asset sepanjang masa manfaat. Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya

Saldo Normal : Kredit

Aset Lainnya	: 1.5
Pengertian	: Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar dan asset tetap.
Saldo Normal	: Debet
Keterangan	: Terdiri atas : Aset Tidak Berwujud, Aset Kerjasama Operasi, Aset Lainnya lain-lain.

Akun kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek : 2.1

Pengertian	: Kewajiban jangka pendek (lancar) merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
Saldo Normal	: Kredit
Keterangan	: Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri atas utang perhitungan pihak ketiga, utang kepada Pihak Ketiga, utang bunga, pendapatan diterima dimuka, utang jangka pendek lainnya.

1. Akun Ekuitas

Ekuitas	: 3.3
Pengertian	: Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah Aset dengan jumlah Utang.
Saldo Normal	: Kredit
Keterangan	: Ekuitas terdiri dari : Ekuitas Tidak Terikat (Ekuitas terdiri dari Ekuitas awal, surplus dan defisit tahun lalu, surplus dan defisit tahun berjalan, dan ekuitas

donasi), ekuitas terikat temporer, dan Ekuitas Terikat Permanen

Ekuitas tidak terikat adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

Ekuitas terikat temporer adalah ekuitas berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan ekuitas tersebut oleh rumah sakit. Pembatasan ekuitas terikat temporer antara lain mencakup :

- (a) Sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu;
- (b) Investasi untuk jangka waktu tertentu;
- (c) Dana yang penggunaannya ditentukan selama periode tertentu dimasa depan;
- (d) Dana untuk memperoleh aset tetap

Ekuitas terikat permanen adalah ekuitas berupa sumber daya yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah/ donatur.

Ekuitas terikat permanen meliputi :

- (a) Tanah atau gedung/bangunan yang disumbangkan untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual;
- (b) Aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.
- (c) Donasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara permanen.

R/K PPKD : 3.4.1

Pengertian : Merupakan rekening antara untuk menampung penerimaan dana oleh Bendahara Pengeluaran dari APBD yang belum dipertanggungjawabkan.

Saldo Normal : Kredit

Ekuitas Awal : 3.5.1

Pengertian : Merupakan hak residual awal RSUD yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali RSUD ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.

Saldo Normal : Kredit

Surplus & Defisit Tahun Lalu : 3.5.2

Pengertian : Surplus dan defisit tahun lalu merupakan akumulasi surplus dan defisit pada periode-periode sebelumnya

Surplus & Defisit Tahun Berjalan : 3.5.3

Pengertian : Surplus dan defisit Tahun Berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan

Ekuitas Donasi : 3.5.4

Pengertian : Ekuitas Donasi merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat

Akun laporan operasional terdiri kelompok akun pendapatan dan biaya yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pendapatan dan beban/biaya BLUD Rumah Sakit yang akan dilaporkan dalam "Laporan Operasional" dengan basis akrual.

A. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan/arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas RSUD selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

1. Jenis Pendapatan

1) Pendapatan operasional

1.1 Jasa layanan

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Penyesuaian;
- c. Jasa layanan lainnya.

1.2 Operasional lainnya

- a. Hibah;
- b. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- c. Dropping APBD/APBN.

1.3 Pendapatan nonoperasional/lain-lain pendapatan

- a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
- c. Jasa giro;
- d. Pendapatan bunga;
- e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- g. Hasil investasi.

2. Penjelasan Kode Akun Pendapatan

Pendapatan : 7

Pengertian : Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas RSUD selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

Saldo Normal : Kredit

Keterangan : Akun pendapatan terdiri atas Pendapatan Operasional, Pendapatan Non Operasional dan Penyesuaian Pendapatan.

Pendapatan Operasional : Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan normal RSUD yang antara lain berupa jasa layanan kesehatan termasuk pula pendapatan dari penggunaan fasilitas umum milik rumah sakit, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan dropping dana dari APBD/APBN.

Pendapatan Jasa Layanan : 7.1.1

Pengertian	: Pendapatan Pelayanan Kesehatan adalah pendapatan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat
Saldo Normal	: Kredit
Keterangan	: Akun pendapatan jasa layanan terdiri dari : - Administrasi/karcis - Tindakan/Operasi - Rawat Jalan - Rawat Inap - Obat-obatan - PHB/BPJS - Laboratorium - Ambulance - Jasa Konsultasi Medik - Radiologi

Penyesuaian Kontraktual :

(Selisih Perhitungan Klaim)

Pengertian	: Penyesuaian lebih/kurang yang terjadi karena perbedaan pendapatan RSUD BLUD Daerah sesuai tariff RSUD BLUD dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh RSUD BLUD Daerah dari pasien peserta program BPJS berupa
------------	--

penggantian klaim BPJS
atau selisih tarif RSUD
BLUD dengan tarif BPJS

Saldo Normal : Debet/Kredit
Keterangan : --

Pendapatan Dropping APBD

Pengertian : Pendapatan dropping dana
APBD/APBN adalah
penerimaan anggaran yang
berasal dari otorisasi kredit
anggaran APBD/APBN dan
bukan dari kegiatan
pembiayaan APBN/APBD.

Saldo Normal : Kredit
Keterangan : Penerimaan alokasi dana
APBD dan Penerimaan
alokasi dana APBN.

Pendapatan Non Operasional

Pengertian : Penerimaan yang berasal
dari kegiatan non
operasional rumah sakit.

Saldo Normal : Kredit
Keterangan : Pendapatan non
operasional/lain-lain
pendapatan, terdiri dari :
- Hasil penjualan
kekayaan yang tidak
dipisahkan;
- Hasil pemanfaatan
kekayaan;

- Jasa giro;
- Pendapatan bunga;
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- Hasil investasi

B. Biaya

Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih

1. Jenis Biaya

Biaya BLUD RSUD terdiri atas :

1) Biaya Operasional**(1) Biaya Pelayanan, terdiri dari :**

- a. biaya pegawai;
- b. biaya bahan;
- c. biaya jasa pelayanan;
- c. biaya pemeliharaan;
- d. biaya barang dan jasa; dan
- e. biaya pelayanan lainnya

(2) Biaya Umum dan Administrasi, terdiri dari:

- a. biaya pegawai;
- b. biaya administrasi kantor;
- c. biaya pemeliharaan;
- d. biaya barang dan jasa; dan
- e. biaya promosi; dan
- f. biaya umum dan administrasi lainnya

2) Biaya Non Operasional

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lainnya

2. Penjelasan Akun Biaya

Biaya : 8

Pengertian : Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih

Saldo Normal : Debet

Keterangan : Biaya Operasional dan Biaya Non Operasional

Biaya Operasional : 8.1

Pengertian : Seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

Saldo Normal : Debet

Keterangan : Terdiri dari biaya pelayanan dan biaya umum dan administrasi.

Biaya Pelayanan, terdiri dari :

- biaya pegawai
- biaya bahan
- biaya jasa pelayanan
- biaya pemeliharaan
- biaya barang dan jasa
- biaya pelayanan lainnya

Biaya Umum dan Administrasi, terdiri dari :

- biaya pegawai

- biaya administrasi kantor
- biaya pemeliharaan
- biaya barang dan jasa
- biaya promosi
- biaya umum dan administrasi lainnya

Biaya Penyusutan

Pengertian	: Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu asset sepanjang masa manfaat.
Saldo Normal	: Kredit
Keterangan	: Metode penyusutan yang digunakan oleh RSUD BLUD adalah metode garis lurus (straight-line method).

Biaya Non Operasional : 8.2

Pengertian	: Seluruh biaya yang menjadi beban RSUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
Saldo Normal	: Debet
Keterangan	: Terdiri atas biaya-biaya yang timbul bukan karena aktivitas/operasional rumah sakit.

Biaya Non Operasional

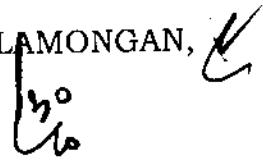
- biaya bunga
- biaya administrasi bank
- biaya kerugian penjualan aset tetap
- biaya kerugian penurunan nilai
- biaya non operasional lainnya

Penyetoran Dana ke Kas Daerah

Pengertian : Penyetoran kas ke Kas Daerah karena sesuatu hal, misalnya atas perintah Bupati untuk menyetorkan surplus anggaran.

Saldo Normal : Debet

Keterangan : --

BUPATI LAMONGAN, 

FADELI

Penyetoran Dana ke Kas Daerah

Pengertian : Penyetoran kas ke Kas Daerah karena sesuatu hal, misalnya atas perintah Bupati untuk menyetorkan surplus anggaran.

Saldo Normal : Debet

Keterangan : --

BUPATI DAMONGAN,

FADELI

Halaman

Jumlah

.. tanggat

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

1. Kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi penerimaan kas.
2. Kolom 2 diisi dengan nomor STS/Nota Kredit atau bukti penerimaan lainnya yang sah.
3. Kolom 3 diisi dengan kode rekening pendapatan dan/atau pembiayaan-penerimaan atau kode rekening lainnya (rincian obyek).
4. Kolom 4 diisi dengan uraian nama rekening pendapatan dan/atau pembiayaan-penerimaan atau kode rekening lainnya (rincian obyek).
5. Kolom 5 diisi dengan tanda *checklist* disesuaikan dengan nomor dokumen sumber dan pada saat posting ke buku besar.
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah penerimaan kas.
7. Kolom 7 diisi dengan jumlah akumulasi penerimaan kas.

FORMAT BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS

BUKU JURNAL PENGELUARAN KAS

Halaman ##

Tanggal	Nomor		Kode Rekening	Uraian	Ref	Jumlah (Rp)	Akumulasi (Rp)
	SP2D/Nota Debet	Bukti Lain					
1	2		3	4	5	6	7
					Jumlah		

....., tanggal

PPK-BLUD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

Cara Pengisian:

- 1. Kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran kas.
- 2. Kolom 2 diisi dengan nomor SP2D/Nota Debet atau Bukti Pengeluaran Lainnya yang sah.
- 3. Kolom 3 diisi dengan kode rekening belanja dan/atau pembiayaan-pengeluaran atau kode rekening lainnya (rincian obyek).
- 4. Kolom 4 diisi dengan uraian nama rekening belanja dan/atau pembiayaan-pengeluaran atau kode rekening lainnya (rincian obyek).
- 5. Kolom 5 diisi dengan tanda *checklist* disesuaikan dengan nomor dokumen sumber dan pada saat posting ke buku besar.
- 6. Kolom 6 diisi dengan jumlah pengeluaran kas.
- 7. Kolom 7 diisi dengan jumlah akumulasi pengeluaran kas.

FORMAT BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening ^{a)} : (rincian objek)
Kode Rekening ^{b)} : (rincian objek)

Halaman: ##

No.	Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah			

..... tanggal.....

PPK-BLUD
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.

Cara Pengisian:

1. ^{a)} Nama rekening diisi dengan uraian nama rekening buku besar pembantu.
2. ^{b)} Kode rekening diisi dengan kode rekening buku besar pembantu.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut bukti transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas dan transaksi kejadian selain kas.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal bukti transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas dan transaksi kejadian selain kas yang didasarkan pada tanggal nota kredit/nota debet/rekening koran dari bank atau bukti transaksi lainnya yang sah.
5. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti tansaksi misalnya nomor STS, SP2D, Nota Debet, Nota Kredit atau bukti lainnya yang sah.
6. Kolom 4 diisi dengan uraian bukti transaksi/kejadian yang terkait dengan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan (rincian obyek).
7. Kolom 5 diisi dengan *tick mark* (kode tertentu) yang menyatakan bahwa bukti transaksi/kejadian penerimaan kas, pengeluaran kas atau transaksi selain kas telah di *cross check dengan* buku besar.
8. Kolom 6 dan Kolom 7 diisi dengan jumlah rupiah.
9. Kolom 8 diisi dengan akumulasi jumlah rupiah pengeluaran kas sampai dengan saat tertentu (penghitungan saldo dilakukan setiap periode waktu tertentu hari/minggu/bulan/triwulan/tahunan) sebagai media *cross check* dengan buku besar.

Catatan:

- Tidak semua rekening buku besar memerlukan buku besar pembantu (sesuai dengan kebutuhan);
- Format buku besar pembantu dapat berbentuk tabelaris.

FORMAT BUKU JURNAL UMUM

BUKU JURNAL UMUM

Halaman ##

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Ref	Jumlah (Rp)	
				Debet	Kredit
1	2	3	4	5	6
			Jumlah		

....., tanggal.....
PPK-BLUD

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

- Cara pengisian:
- 1. Kolom 1 diisi dengan tanggal transaksi penerimaan kas, pengeluaran kas dan transaksi selain kejadian non kas yang didasarkan pada tanggal nota kredit/nota debet/rekening koran dari bank atau bukti transaksi/ kejadian lainnya.
 - 2. Kolom 2 diisi dengan nomor bukti misalnya nomor SPJ, surat perintah pencairan dana (SP2D), surat tanda setoran (STS), atau bukti lainnya yang sah.
 - 3. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi/ kejadian atas aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan atau pembiayaan.
 - 4. Kolom 4 diisi dengan *tick mark* (kode tertentu) yang menyatakan bahwa transaksi/kejadian penerimaan kas, pengeluaran kas atau transaksi selain kas telah di *cross check* dengan buku besar.
 - 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah.
 - 6. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah.

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL/AKTIVITAS

PEMERINTAH

SATKER BLUD

LAPORAN OPERASIONAL/AKTIVITAS

TAHUN 20XX DAN 20XX-1

URAIAN	TAHUN 20XX	TAHUN 20XX-1
A.PENDAPATAN		
1. PENDAPATAN JASA LAYANAN		
1) Jasa Layanan	999.999	999.999
2) Potongan Pendapatan Jasa Pelayanan Layanan	999.999	999.999
(1) Penyesuaian Tarif Kontraktual Pasien Askes	999.999	999.999
(2) Penyesuaian Tarif Kontraktual Pasien Jamkesmas	999.999	999.999
(3) Penyesuaian Tarif Kontraktual Pasien Perush Kerjasama	999.999	999.999
(4) Pelayanan Amal	999.999	999.999
(5) Penyisihan Piutang	999.999	999.999
(6) Penghapusan Piutang	999.999	999.999
Jumlah Potongan Pendapatan Jasa Layanan	999.999	999.999
Jumlah Pendapatan Jasa Layanan	999.999	999.999
2. PENDAPATAN HIBAH		
1) Hibah Tidak Terikat	999.999	999.999
2) Hibah Terikat	999.999	999.999
Jumlah Pendapatan Hibah		
3. PENDAPATAN HASIL KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN		
1) Hasil Kerjasama Operasional	999.999	999.999
2) Sewa	999.999	999.999
3) Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	999.999	999.999
Jumlah Pendapatan Hasil Kerjasama	999.999	999.999
4. PENDAPATAN APBD		
1) Belanja Tidak Langsung	999.999	999.999
2) Belanja Langsung	999.999	999.999
Jumlah Pendapatan APBD	999.999	999.999
5. PENDAPATAN APBN		
1) Operasional	999.999	999.999
2) Investasi	999.999	999.999
Jumlah Pendapatan APBN	999.999	999.999
6. LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH	999.999	999.999
1) Hasil Penjualan Kekayaan Yang Dipisahkan	999.999	999.999
2) Hasil Pemanfaatan Kekayaan	999.999	999.999
3) Jasa Giro	999.999	999.999
4) Pendapatan Bunga	999.999	999.999

URAIAN	TAHUN 20XX	TAHUN 20XX-1
5) Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	999.999	999.999
6) Komisi dan Potongan	999.999	999.999
7) Hasil Investasi Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	999.999	999.999
Jumlah Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	999.999	999.999
JUMLAH PENDAPATAN	999.999	999.999
B, BIAYA		
1. BIAYA OPERASIONAL		
1) BIAYA PELAYANAN		
(1) Biaya Pegawai	999.999	999.999
(2) Biaya Bahan	999.999	999.999
(3) Biaya Jasa Layanan	999.999	999.999
(4) Biaya Pemeliharaan	999.999	999.999
(5) Biaya Barang dan Jasa	999.999	999.999
(6) Biaya Penyusutan	999.999	999.999
(7) Biaya Pelayanan Lain-lain	999.999	999.999
Jumlah Biaya Pelayanan	999.999	999.999
2) BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI		
(1) Biaya Pegawai	999.999	999.999
(2) Biaya Administrasi Kantor	999.999	999.999
(3) Biaya Pemeliharaan	999.999	999.999
(4) Biaya Barang dan Jasa	999.999	999.999
(5) Biaya Promosi	999.999	999.999
(6) Biaya Penyusutan	999.999	999.999
(7) Biaya Umum dan Administrasi lainnya	999.999	999.999
Jumlah Biaya Umum dan Adminstrasi	999.999	999.999
2. BIAYA NON OPERASIONAL		
1) Biaya Bunga	999.999	999.999
2) Biaya Administrasi Bank	999.999	999.999
3) Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap	999.999	999.999
4) Biaya Kerugian Penurunan Nilai	999.999	999.999
5) Biaya Non Operasional Lainnya	999.999	999.999
Jumlah Biaya Non Operasional	999.999	999.999
JUMLAH BIAYA	999.999	999.999
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGIAN		
Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar	999.999	999.999
Kerugian Penjualan Aset Non Lancar	999.999	999.999
Rugi Penurunan Nilai	999.999	999.999
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA		
Pos-Pos Luar Biasa		
Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa	999.999	999.999
Biaya dari Kejadian Luar Biasa	999.999	999.999
Jumlah Pos-Pos Luar Biasa	999.999	999.999

URAIAN	TAHUN 20XX	TAHUN 20XX-1
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN BERSIH	999.999	999.999
SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN DILUAR PENDAPATAN APBD/APBN	999.999	999.999

, tanggal

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

FORMAT NERACA

PEMERINTAH
SATKER BLUD
NERACA
PER 31 Desember 20XX dan 20XX-1

URAIAN	TAHUN 20XX	TAHUN 20XX-1
ASET		
Aset Lancar:		
Kas dan Setara Kas	999.999	999.999
Investasi Jangka Pendek	999.999	999.999
Piutang Usaha	999.999	999.999
Piutang Lain-lain	999.999	999.999
Persediaan	999.999	999.999
Uang Muka	999.999	999.999
Biaya Dibayar di Muka	999.999	999.999
Jumlah Aset Lancar	999.999	999.999
Investasi Jangka Panjang	999.999	999.999
Aset Tetap:		
Tanah	999.999	999.999
Gedung dan Bangunan	999.999	999.999
Peralatan dan Mesin	999.999	999.999
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	999.999	999.999
Aktiva Tetap Lainnya	999.999	999.999
Konstruksi dalam Pengerjaan	999.999	999.999
Jumlah Aset Tetap	999.999	999.999
Akumulasi Penyusutan	999.999	999.999
Nilai Buku Aset Tetap	999.999	999.999
Aset Lainnya:		
Aset Kerja Sama Operasi	999.999	999.999
Aset Sewa Guna Usaha	999.999	999.999
Aset Tak Berwujud	999.999	999.999
Aset Lain-lain	999.999	999.999
Jumlah Aset Lainnya	999.999	999.999
JUMLAH ASET	999.999	999.999
KEWAJIBAN		
Kewajiban Lancar		
Utang Usaha	999.999	999.999
Utang Pajak	999.999	999.999
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	999.999	999.999

URAIAN	TAHUN 20XX	TAHUN 20XX-1
Pendapatan Diterima Di muka	999.999	999.999
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	999.999	999.999
Utang Bunga	999.999	999.999
Utang Jangka Pendek Lainnya	999.999	999.999
Jumlah Kewajiban Lancar	999.999	999.999
Kewajiban Jangka Panjang	999.999	999.999
JUMLAH KEWAJIBAN	999.999	999.999
EKUITAS		
Ekuitas Tidak Terikat		
Ekuitas Awal	999.999	999.999
Surplus & Defisit Tahun Lalu	999.999	999.999
Surplus & Defisit Tahun Berjalan	999.999	999.999
Ekuitas Donasi	999.999	999.999
Ekuitas Terikat Temporer	999.999	999.999
Ekuitas Terikat Permanen	999.999	999.999
JUMLAH EKUITAS	999.999	999.999
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	999.999	999.999

, tanggal
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

PEMERINTAH
 SATKER BLUD
 LAPORAN ARUS KAS
 TAHUN 20XX DAN 20XX-1

URAIAN	TAHUN 20XX	TAHUN 20XX-1
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk:		
Pendapatan Jasa Layanan	999.999	999.999
Penerimaan Piutang	999.999	999.999
Pendapatan Hibah	999.999	999.999
Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain	999.999	999.999
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	999.999	999.999
Jumlah Arus Kas Masuk	999.999	999.999
Arus Kas Keluar:		
Biaya Operasional		
Biaya Layanan	999.999	999.999
Biaya Umum dan Administrasi	999.999	999.999
Biaya Non Operasional	999.999	999.999
Jumlah Arus Kas Keluar	999.999	999.999
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	999.999	999.999
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk:		
Hasil Penjualan Aset Tetap	999.999	999.999
Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang	999.999	999.999
Hasil Penjualan Aset Lainnya	999.999	999.999
Jumlah Arus Kas Masuk	999.999	999.999
Arus Kas Keluar:		
Perolehan Aset Tetap	999.999	999.999
Perolehan Investasi Jangka Panjang	999.999	999.999
Perolehan Aset Lainnya	999.999	999.999
Jumlah Arus Kas Keluar	999.999	999.999
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	999.999	999.999
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk:		
APBD	999.999	999.999
APBN	999.999	999.999
Perolehan Pinjaman	999.999	999.999

Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman	999.999	999.999
Jumlah Arus Kas Masuk	999.999	999.999
URAIAN	TAHUN 20XX	TAHUN 20XX-1
Arus Kas Keluar:		
Pembayaran Pokok Pinjaman	999.999	999.999
Pemberian Pinjaman	999.999	999.999
Jumlah Arus Kas Keluar	999.999	999.999
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	999.999	999.999
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	999.999	999.999
Kas dan Setara Kas Awal	999.999	999.999
Jumlah Saldo Kas	999.999	999.999

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Struktur Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan

- a. Sejarah pembentukan BLUD;
- b. Dasar hukum pembentukan BLUD;
- c. Alamat kantor BLUD, unit vertikal BLUD, dan unit usaha BLUD;
- d. Keterangan mengenai hakikat operasi dan kegiatan utama BLUD;
- e. Nama pejabat pengelola dan dewan pengawas BLUD;
- f. Jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.

2. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh BLUD dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- a. Pendahuluan;
- b. Kebijakan akuntansi;
- c. Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional;
- d. Penjelasan atas pos-pos neraca;
- e. Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas;
- f. Kewajiban kontinjensi;
- g. Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan terdiri dari :

a. Pendapatan

- Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan;
- Hibah terikat dan tidak terikat;
- Pendapatan Usaha Lainnya, meliputi hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain;
- Pendapatan dari APBN/APBD, meliputi Pendapatan APBN/APBD Operasional dan APBN/APBD Investasi.

b. Biaya

- Biaya Pelayanan
 - ✓ biaya pegawai;
 - ✓ biaya bahan;
 - ✓ biaya jasa layanan;
 - ✓ biaya pemeliharaan;
 - ✓ biaya daya dan jasa;
 - ✓ dan lain-lain.

- Biaya Umum dan Administrasi
 - ✓ biaya pegawai;
 - ✓ biaya administrasi perkantoran;
 - ✓ biaya pemeliharaan;
 - ✓ biaya langganan daya dan jasa;
 - ✓ biaya promosi;
 - ✓ dan lain-lain.
- Biaya Lainnya
 - ✓ biaya bunga;
 - ✓ biaya administrasi bank;
 - ✓ dan lain-lain.

c. Aset

Aset lancar, mencakup:

- kas dan setara kas;
- investasi jangka pendek;
- piutang usaha;
- persediaan;
- uang muka; dan
- biaya dibayar di muka.

Investasi Jangka Panjang Aset tetap, mencakup:

- tanah;
- gedung dan bangunan;
- peralatan dan mesin;
- jalan, irigasi, dan jaringan;
- aset tetap lainnya;
- konstruksi dalam pengerjaan.

Aset lainnya mencakup:

- aset kerja sama operasi;
- aset sewa guna usaha;
- aset tak berwujud; dan
- aset lain-lain.

d. Kewajiban

- Kewajiban Jangka Pendek, mencakup:
 - utang usaha;
 - utang pajak;
 - biaya yang masih harus dibayar;
 - pendapatan diterima di muka;
 - bagian lancar utang jangka panjang; dan
 - utang jangka pendek lainnya.
- Kewajiban Jangka Panjang.

e. Ekuitas

Ekuitas BLUD diklasifikasikan menjadi :

- Ekuitas Tidak Terikat, yang terdiri atas:
 - ekuitas awal;
 - surplus & defisit tahun lalu;
 - surplus & defisit tahun berjalan;
 - ekuitas donasi;
 - Ekuitas Terikat Temporer; dan
 - Ekuitas Terikat Permanen.
- f. Komponen-komponen pelaporan arus kas
- Arus kas dari aktivitas operasi;
 - Arus kas dari aktivitas investasi; dan
 - Arus kas dari aktivitas pendanaan.
4. Kewajiban Kontinjensi adalah :
- a. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa yang akan datang, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali BLUD.
 - b. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) BLUD mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
- Terkait dengan kewajiban kontinjensi, hal-hal yang diinformasikan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain:
- a. uraian ringkas mengenai karakteristik kewajiban kontinjensi;
 - b. estimasi dari dampak finansial yang terukur;
 - c. indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan
 - d. kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.
5. Informasi Tambahan
- BLUD mengungkapkan hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

FORMAT LAPORAN PENERIMAAN KAS SKPD:.....
LAPORAN PENERIMAAN KAS

SKPD
Pengguna Anggaran
Bendahara
Penerimaan

Halaman:

[illegible]

Coret yang tidak perlu

....., tanggal

Bendahara Penerimaan

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Cara Pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Penerimaan/Pemungutan Kas atau Pengeluaran/ Penyetoran Kas.
2. Kolom 2 diisi dengan Nomor Kode Rekening.
3. Kolom 3 diisi dengan Uraian Nama Rekening.
4. Kolom 4 diisi dengan Jumlah Rupiah Penerimaan Kas.
5. Kolom 5 diisi dengan Jumlah Rupiah Pengeluaran Kas.
6. Kolom 6 diisi dengan Jumlah Saldo Kas (Saldo Awal ditambah Penerimaan Kas dikurangi Pengeluaran Kas).

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN KAS

LAPORAN PENGELUARAN KAS

SKPD
Kepala SKPD
Bendahara Pengeluaran

Halaman:

Nomor Urut	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saido (Rp)
1	2	3	4	5	6
	<!-- Row 1 --> <!-- Row 2 --> <!-- Row 3 --> <!-- Row 4 -->				
		Jumlah			

⁷¹Coret yang tidak perlu

....., tanggal
Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Cara Pengisian:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan kas atau pengeluaran kas.
2. Kolom 2 diisi dengan nomor kode rekening.
3. Kolom 3 diisi dengan uraian nama rekening.
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah saldo kas (saldo awal ditambah penerimaan kas dikurangi pengeluaran kas).

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN BLUD
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹
.....²

LAPORAN PENDAPATAN BLUD.....
TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
	Pendapatan BLUD 1. Jasa Layanan 2. Hibah 3. Hasil Kerjasama 4. Pendapatan Lain yang Sah					
	Jumlah					

.....20....³

Pemimpin BLUD,

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.....

(nama lengkap)
NIP.....⁴

Keterangan:
¹ diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota
² diisi nama BLUD.
³ diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat.
⁴ diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS).

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¹
.....²
LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD.....³
TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REAUSASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN /NI/	REAUSASI S/D TRIWULAN /NI/	LEBIH (KURANG)
A.	BIAYA OPERASIONAL 1. Biaya Pelayanan a. Biaya pegawai b. Biaya bahan c. Biaya jasa pelayanan d. Biaya pemeliharaan e. Biaya barang & jasa f. Biaya pelayanan lain-lain 2. Biaya Umum & Administrasi a. Biaya Pegawai b. Biaya administrasi kantor c. Biaya pemeliharaan d. Biaya barang & jasa e. Biaya promosi f. Biaya umum & adm. lain- lain					
B.	BIAYA NON OPERASIONAL a. Biaya bunga b. Biaya administrasi bank c. Biaya kerugian penjualan aset tetap d. Biaya kerugian penurunan nilai e. Biaya non operasional lain-lain					
	JUMLAH					

.....20....⁴

Pemimpin BLUD,

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.....

(nama lengkap)
NIP.....⁵

Keterangan:
¹ diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota
² diisi nama BLUD.
³ diisi, Nama BLUD.
⁴ diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat.
⁵ diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Pemimpin BLUD yang berasal dari PNS).

00	00	1.0.0.00.00	ASET
00	00	1.1.0.00.00	ASET LANCAR
00	00	1.1.1.00.00	Kas
01	00	1.1.1.01.00	Kas di Kas Daerah
01	01	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah
02	00	1.1.1.02.00	Kas di Bendahara Penerimaan
02	01	1.1.1.02.01	Kas di Bendahara Penerimaan
02	02	1.1.1.02.02	Bank di Bendahara Penerimaan
02	02	1.1.1.02.03	Kas Penerimaan Uang Muka Pasien
03	00	1.1.1.03.00	Kas di Bendahara Pengeluaran
03	01	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran
03	01	1.1.1.03.02	Kas Pengeluaran Gaji
03	01	1.1.1.03.03	Kas Pengeluaran Jasa Pelayanan
03	02	1.1.1.03.02	Bank di Bendahara Pengeluaran
00	00	1.1.2.00.00	Investasi Jangka Pendek
01	00	1.1.2.01.00	Investasi Jangka Pendek dalam Saham
01	01	1.1.2.01.01	Investasi Jangka Pendek dalam Saham
02	00	1.1.2.02.00	Investasi Jangka Pendek dalam Obligasi
02	01	1.1.2.02.01	Investasi Jangka Pendek dalam Obligasi
02	01	1.1.2.02.02	Deposito
00	00	1.1.3.00.00	Piutang
01	00	1.1.3.01.00	Piutang Pajak
01	01	1.1.3.01.01	Piutang Pajak
02	00	1.1.3.02.00	Piutang Retribusi
02	01	1.1.3.02.01	Piutang Retribusi
02	01	1.1.3.02.02	Piutang Asuransi
02	01	1.1.3.02.03	Piutang Askes Sosial
02	01	1.1.3.02.04	Piutang Askes Komersial
02	01	1.1.3.02.05	Piutang Jamsostek
02	01	1.1.3.02.06	Piutang Jaminan Kesehatan Masyarakat
02	01	1.1.3.02.07	Piutang Jaminan Kesehatan Daerah
02	01	1.1.3.02.08	Piutang Pasien Umum
02	01	1.1.3.02.09	Piutang Pelayanan Lainnya
03	00	1.1.3.03.00	Piutang Dana Bagi Hasil
03	01	1.1.3.03.01	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak
03	02	1.1.3.03.02	Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
04	00	1.1.3.04.00	Piutang Dana Alokasi Umum
04	01	1.1.3.04.01	Piutang Dana Alokasi Umum
05	00	1.1.3.05.00	Piutang Dana Alokasi Khusus
05	01	1.1.3.05.01	Piutang Dana Alokasi Khusus
00	00	1.1.4.00.00	Piutang Lain-lain
01	00	1.1.4.01.00	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran
01	01	1.1.4.01.01	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor
01	02	1.1.4.01.02	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Rumah
01	02	1.1.4.01.03	Piutang Pegawai
01	02	1.1.4.01.02	Piutang TGR
01	02	1.1.4.01.03	Piutang Pegawai Lainnya
01	02	1.1.4.01.04	Piutang Sewa Lahan untuk ATM
01	02	1.1.4.01.05	Piutang Sewa Lahan untuk BTS
02	00	1.1.4.02.00	Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah
02	01	1.1.4.02.01	Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah
03	00	1.1.4.03.00	Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
03	01	1.1.4.03.01	Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah
03	01	1.1.4.03.02	Piutang Pendapatan Jasa Laundry
03	01	1.1.4.03.03	Piutang Pendapatan Jasa Sterilisasi Alat
03	01	1.1.4.03.04	Piutang Pendapatan Jasa Incenerator
03	01	1.1.4.03.05	Piutang Pendapatan Jasa Pendidikan
04	00	1.1.4.04.00	Piutang Dividen
04	01	1.1.4.04.01	Piutang Dividen
04	01	1.1.4.04.01	Piutang Dividen
04	01	1.1.4.04.01	Piutang Denda
05	00	1.1.4.05.00	Piutang Bagi Hasil Labs Usaha Perusahaan Daerah
05	01	1.1.4.05.01	Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah
06	00	1.1.4.06.00	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
06	01	1.1.4.06.01	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
07	00	1.1.4.07.00	Piutang BLUD
07	01	1.1.4.07.01	Piutang BLUD
07	99	1.1.4.07.99	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
08	00	1.1.4.08.00	Piutang Lain - Lain
08	01	1.1.4.08.01	Piutang Lain - Lain
00	00	1.1.5.00.00	Persediaan
01	00	1.1.5.01.00	Persediaan Alat Tulis Kantor
01	01	1.1.5.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor

01	01	1.1.5.01.01	Persediaan Linen
01	01	1.1.5.01.02	Persediaan Barang Kelontong
02	00	1.1.5.02.00	Persediaan Alat Listrik
02	01	1.1.5.02.01	Persediaan Alat Listrik
02	01	1.1.5.02.01	Persediaan Sparepart/Suku Cadang
02	01	1.1.5.02.02	Persediaan.....
03	00	1.1.5.03.00	Persediaan Material/Bahan
03	01	1.1.5.03.01	Persediaan Bahan Baku Bangunan
03	02	1.1.5.03.02	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas
03	03	1.1.5.03.03	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
03	04	1.1.5.03.04	Persediaan Bibit Ternak
03	05	1.1.5.03.05	Persediaan Obat-obatan
03	06	1.1.5.03.06	Persediaan Bahan Kimia
03	06	1.1.5.03.07	Persediaan Barang Farmasi
03	06	1.1.5.03.08	Persediaan Alat Kesehatan
03	06	1.1.5.03.09	Persediaan Obat
03	06	1.1.5.03.10	Persediaan Reagen
03	06	1.1.5.03.11	Persediaan Gas Medis
03	06	1.1.5.03.12	Persediaan X-Ray Film
03	06	1.1.5.03.13	Persediaan.....
04	00	1.1.5.04.00	Persediaan Benda Pos
04	01	1.1.5.04.01	Persediaan Perangko
04	02	1.1.5.04.02	Persediaan Materai
04	03	1.1.5.04.03	Persediaan Kertas Segel
05	00	1.1.5.05.00	Persediaan Bahan Bakar
05	01	1.1.5.05.01	Persediaan Bahan Bakar Minyak
06	00	1.1.5.06.00	Persediaan Bahan Makanan Pokok
06	01	1.1.5.06.01	Persediaan Bahan Makanan Pokok/Basah
06	02	1.1.5.06.02	Persediaan Bahan Makanan Kering untuk Pasien
06	03	1.1.5.06.03	Persediaan Bahan Makanan Kering untuk Karyawan
00	00	1.1.6.00.00	Biaya Dibayar Dimuka
01	00	1.1.6.01.00	Biaya Dibayar Dimuka
01	01	1.1.6.01.01	Dropping Dana Pelayanan Jamkesmas
01	02	1.1.6.01.02	Uang Muka Belanja
01	03	1.1.6.01.03	Pajak Dibayar Dimuka
01	04	1.1.6.01.04	Biaya Dibayar Dimuka
00	00	1.2.0.00.00	INVESTASI JANGKA PANJANG
00	00	1.2.1.00.00	Investasi Non Permanen
01	00	1.2.1.01.00	Pinjaman kepada Perusahaan Negara
01	01	1.2.1.01.01	Pinjaman kepada Perusahaan Negara
02	00	1.2.1.02.00	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
02	01	1.2.1.02.01	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
03	00	1.2.1.03.00	Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
03	01	1.2.1.03.01	Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
04	00	1.2.1.04.00	Investasi dalam Surat Utang Negara
04	01	1.2.1.04.01	Investasi dalam Surat Utang Negara
05	00	1.2.1.05.00	Investasi Non Permanen Lainnya
05	01	1.2.1.05.01	Investasi Non Permanen Lainnya
00	00	1.2.2.00.00	Investasi Permanen
01	00	1.2.2.01.00	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
01	01	1.2.2.01.01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
02	00	1.2.2.02.00	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan
02	01	1.2.2.02.01	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan
03	00	1.2.2.03.00	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan
03	01	1.2.2.03.01	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan
04	00	1.2.2.04.00	Investasi Permanen Lainnya
04	01	1.2.2.04.01	Investasi Permanen Lainnya
00	00	1.3.0.00.00	ASET TETAP
00	00	1.3.1.00.00	Tanah
01	00	1.3.1.01.00	Tanah Kantor
01	01	1.3.1.01.01	Tanah Kantor
02	00	1.3.1.02.00	Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit
02	01	1.3.1.02.01	Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit
03	00	1.3.1.03.00	Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas
03	01	1.3.1.03.01	Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas
04	00	1.3.1.04.00	Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik
04	01	1.3.1.04.01	Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik
05	00	1.3.1.05.00	Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak
05	01	1.3.1.05.01	Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak
06	00	1.3.1.06.00	Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar
06	01	1.3.1.06.01	Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar
07	00	1.3.1.07.00	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan
07	01	1.3.1.07.01	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan
08	00	1.3.1.08.00	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan

08	01	1.3.1.08.01	Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan dan Kejuruan
09	00	1.3.1.09.00	Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus
09	01	1.3.1.09.01	Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa
09	02	1.3.1.09.02	Tanah Sarana Pendidikan Luar Khusus
10	00	1.3.1.10.00	Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan dan Kursus
10	01	1.3.1.10.01	Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan
10	02	1.3.1.10.02	Tanah Sarana Pendidikan Kursus
11	00	1.3.1.11.00	Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan
11	01	1.3.1.11.01	Tanah Sarana Sosial Panti Asuhan
12	00	1.3.1.12.00	Tanah Sarana Sosial Panti Jompo
12	01	1.3.1.12.01	Tanah Sarana Sosial Panti Jompo
13	00	1.3.1.13.00	Tanah Sarana Umum Terminal
13	01	1.3.1.13.01	Tanah Sarana Umum Terminal
14	00	1.3.1.14.00	Tanah Sarana Umum Dermaga
14	01	1.3.1.14.01	Tanah Sarana Umum Dermaga
15	00	1.3.1.15.00	Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis
15	01	1.3.1.15.01	Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis
16	00	1.3.1.16.00	Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan
16	01	1.3.1.16.01	Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan
17	00	1.3.1.17.00	Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan
17	01	1.3.1.17.01	Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan
18	00	1.3.1.18.00	Tanah Sarana Umum Pasar
18	01	1.3.1.18.01	Tanah Sarana Umum Pasar
19	00	1.3.1.19.00	Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah
19	01	1.3.1.19.01	Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah
20	00	1.3.1.20.00	Tanah Sarana Umum Taman
20	01	1.3.1.20.01	Tanah Sarana Umum Taman
21	00	1.3.1.21.00	Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat
21	01	1.3.1.21.01	Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat
22	00	1.3.1.22.00	Tanah Sarana Umum Ibadah
22	01	1.3.1.22.01	Tanah Sarana Umum Ibadah
23	00	1.3.1.23.00	Tanah Sarana Stadion Olahraga
23	01	1.3.1.23.01	Tanah Sarana Stadion Olahraga
24	00	1.3.1.24.00	Tanah Perumahan
24	01	1.3.1.24.01	Tanah Perumahan
25	00	1.3.1.25.00	Tanah Pertanian
25	01	1.3.1.25.01	Tanah Pertanian
26	00	1.3.1.26.00	Tanah Perkebunan
26	01	1.3.1.26.01	Tanah Perkebunan
27	00	1.3.1.27.00	Tanah Perikanan
27	01	1.3.1.27.01	Tanah Perikanan
28	00	1.3.1.28.00	Tanah Peternakan
28	01	1.3.1.28.01	Tanah Peternakan
29	00	1.3.1.29.00	Tanah Perkampungan
29	01	1.3.1.29.01	Tanah Perkampungan
30	00	1.3.1.30.00	Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku
30	01	1.3.1.30.01	Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku
00	00	1.3.2.00.00	Peralatan dan Mesin
01	00	1.3.2.01.00	Alat-alat Berat
01	01	1.3.2.01.01	Traktor
01	02	1.3.2.01.02	Buldozer
01	03	1.3.2.01.03	Stoom Wals
01	04	1.3.2.01.04	Eskavator
01	05	1.3.2.01.05	Dump truk
01	06	1.3.2.01.06	Crane
01	07	1.3.2.01.07	Kendaraan penyapu jalan
01	08	1.3.2.01.08	Mesin pengolah semen
01	09	1.3.2.01.09	Mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)
02	00	1.3.2.02.00	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
02	01	1.3.2.02.01	Alat-alat angkutan darat bermotor sedan
02	02	1.3.2.02.02	Alat-alat angkutan darat bermotor jeep
02	03	1.3.2.02.03	Alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
02	04	1.3.2.02.04	Alat-alat angkutan darat bermotor bus
02	05	1.3.2.02.05	Alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
02	06	1.3.2.02.06	Alat-alat angkutan darat bermotor truck
02	07	1.3.2.02.07	Alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)
02	08	1.3.2.02.08	Alat-alat angkutan darat bermotor boks
02	09	1.3.2.02.09	Alat-alat angkutan darat bermotor pick up
02	10	1.3.2.02.10	Alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
02	11	1.3.2.02.11	Alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran
02	12	1.3.2.02.12	Alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
02	13	1.3.2.02.13	Alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator
02	14	1.3.2.02.14	Alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan
03	00	1.3.2.03.00	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

03	01	1.3.2.03.01	Gerobak
03	02	1.3.2.03.02	Pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong
03	03	1.3.2.03.03	Becak
03	04	1.3.2.03.04	Sepeda
03	05	1.3.2.03.05	Karavan
04	00	1.3.2.04.00	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor
04	01	1.3.2.04.01	Kapal motor
04	02	1.3.2.04.02	Kapal feri
04	03	1.3.2.04.03	Speed boat
04	04	1.3.2.04.04	Motor boat motor tempel
04	05	1.3.2.04.05	Hydro foil
04	06	1.3.2.04.06	Jet foil
04	07	1.3.2.04.07	Kapal tug boat
04	08	1.3.2.04.08	Kapal tanker
04	09	1.3.2.04.09	Kapal kargo
05	00	1.3.2.05.00	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor
05	01	1.3.2.05.01	Perahu lavar
05	02	1.3.2.05.02	Perahu sampan
05	03	1.3.2.05.03	Perahu Longkang
05	04	1.3.2.05.04	Perahu karet
05	05	1.3.2.05.05	Perahu rakit
05	06	1.3.2.05.06	Perahu sekoci
06	00	1.3.2.06.00	Alat-alat Angkutan Udara
06	01	1.3.2.06.01	Pesawat kargo
06	02	1.3.2.06.02	Pesawat penumpang
06	03	1.3.2.06.03	Pesawat helikopter
06	04	1.3.2.06.04	Pesawat pemadam kebakaran
06	05	1.3.2.06.05	Pesawat capung
06	06	1.3.2.06.06	Pesawat terbang ampibi
06	07	1.3.2.06.07	Pesawat terbang layang
07	00	1.3.2.07.00	Alat-alat Bengkel
07	01	1.3.2.07.01	Mesin las
07	02	1.3.2.07.02	Mesin bubut
07	03	1.3.2.07.03	Mesin dongkrak
07	04	1.3.2.07.04	Mesin kompresor
08	00	1.3.2.08.00	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
08	01	1.3.2.08.01	Penggiling hasil pertanian
08	02	1.3.2.08.02	Alat pengering gabah
08	03	1.3.2.08.03	Mesin bajak
08	04	1.3.2.08.04	Alat penetas
09	00	1.3.2.09.00	Peralatan Kantor
09	01	1.3.2.09.01	Mesin tik
09	02	1.3.2.09.02	Mesin hitung
09	03	1.3.2.09.03	Mesin stensil
09	04	1.3.2.09.04	Mesin fotocopy
09	05	1.3.2.09.05	Mesin cetak
09	06	1.3.2.09.06	Mesin jilid
09	07	1.3.2.09.07	Mesin potong kertas
09	08	1.3.2.09.08	Mesin penghancur kertas
09	09	1.3.2.09.09	Papan tulis elektronik
09	10	1.3.2.09.10	Papan visual elektronik
09	11	1.3.2.09.11	Tabung pemadam kebakaran
10	00	1.3.2.10.00	Perlengkapan Kantor
10	01	1.3.2.10.01	Meja gambar
10	02	1.3.2.10.02	Almari
10	03	1.3.2.10.03	Brankas
10	04	1.3.2.10.04	Filing kabinet
10	05	1.3.2.10.05	White board
10	06	1.3.2.10.06	Penunjuk waktu
11	00	1.3.2.11.00	Komputer
11	01	1.3.2.11.01	Komputer mainframe/server
11	02	1.3.2.11.02	Komputer/PC
11	03	1.3.2.11.03	Komputer note book
11	04	1.3.2.11.04	Printer
11	05	1.3.2.11.05	Scanner
11	06	1.3.2.11.06	Monitor/display
11	07	1.3.2.11.07	CPU
11	09	1.3.2.11.09	Kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
11	10	1.3.2.11.10	Peralatan jaringan komputer
12	00	1.3.2.12.00	Meubelair
12	01	1.3.2.12.01	Meja kerja
12	02	1.3.2.12.02	Meja rapat
12	03	1.3.2.12.03	Meja makan
12	04	1.3.2.12.04	Kursi kerja

12	05	1.3.2.12.05	Kursi rapat
12	06	1.3.2.12.06	Kursi makan
12	07	1.3.2.12.07	Tempat tidur
12	08	1.3.2.12.08	Sofa
12	09	1.3.2.12.09	Rak buku/tv/kembang
13	00	1.3.2.13.00	Peralatan Dapur
13	01	1.3.2.13.01	Tabung gas
13	02	1.3.2.13.02	Kompor gas
13	03	1.3.2.13.03	Lemari makan
13	04	1.3.2.13.04	Dispenser
13	05	1.3.2.13.05	Kulkas
13	06	1.3.2.13.06	Rak piring
13	07	1.3.2.13.07	Piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
14	00	1.3.2.14.00	Penghias Ruangan Rumah Tangga
14	01	1.3.2.14.01	Lampu hias
14	02	1.3.2.14.02	Jam dinding/meja
15	00	1.3.2.15.00	Alat-alat Studio
15	01	1.3.2.15.01	Kamera
15	02	1.3.2.15.02	Handycam
15	03	1.3.2.15.03	Proyektor
16	00	1.3.2.16.00	Alat-alat Komunikasi
16	01	1.3.2.16.01	Telepon
16	02	1.3.2.16.02	Faximili
16	03	1.3.2.16.03	Radio ssb
16	04	1.3.2.16.04	Radio HF/FM (handy talkie)
16	05	1.3.2.16.05	Radio VHF
16	06	1.3.2.16.06	Radio UHF
16	07	1.3.2.16.07	Alat sandi
17	00	1.3.2.17.00	Alat-alat Ukur
17	01	1.3.2.17.01	Timbangan
17	02	1.3.2.17.02	Teodolite
17	03	1.3.2.17.03	Alat uji emisi
17	04	1.3.2.17.04	Alat GPS
17	05	1.3.2.17.05	Kompas/peralatan navigasi
17	06	1.3.2.17.06	Bejana ukur
17	07	1.3.2.17.07	Barometer
17	08	1.3.2.17.08	Seismograph
17	09	1.3.2.17.09	Ultrasonograph
18	00	1.3.2.18.00	Alat-alat Kedokteran
18	01	1.3.2.18.01	Alat-alat kedokteran umum
18	02	1.3.2.18.02	Alat-alat kedokteran gigi
18	03	1.3.2.18.03	Alat alat kedokteran tht
18	04	1.3.2.18.04	Alat-alat kedokteran mata
18	05	1.3.2.18.05	Alat-slat kedokteran bedah
18	06	1.3.2.18.06	Alat-aiat kedokteran anak
18	07	1.3.2.18.07	Alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
18	08	1.3.2.18.08	Alat-alat kedokteran kulit dan kelamin
18	09	1.3.2.18.09	Alat-alat kedokteran kardiologi
18	10	1.3.2.18.10	Alat-alat kedokteran neurologi
18	11	1.3.2.18.11	Alat-alat kedokteran orthopedi
18	12	1.3.2.18.12	Alat-alat kedokteran hewan
18	13	1.3.2.18.13	Alat-alat farmasi
18	14	1.3.2.18.14	Alat-alat penyakit dalam/internis
19	00	1.3.2.19.00	Alat-alat Laboratorium
19	01	1.3.2.19.01	Alat-alat laboratorium biologi
19	02	1.3.2.19.02	Alat-alat laboratorium fisikajgeologi/geodesi
19	03	1.3.2.19.03	Alat-alat laboratorium kimia
19	04	1.3.2.19.04	Alat-alat laboratorium pertanian
19	05	1.3.2.19.05	Alat-alat laboratorium peternakan
19	06	1.3.2.19.06	Alat-alat laboratorium perkebunan
19	07	1.3.2.19.07	Alat-alat laboratorium perikanan
19	08	1.3.2.19.08	Alat-alat laboratorium bahasa
19	09	1.3.2.19.09	Alat-alat peraga / praktik sekolah
20	00	1.3.2.20.00	Alat-alat Persenjataan/Keamanan
20	01	1.3.2.20.01	Senjata api
20	02	1.3.2.20.02	Mobil water canon
20	03	1.3.2.20.03	Borgol
20	04	1.3.2.20.04	Sangkur bayonet
20	05	1.3.2.20.05	Perisai tameng
20	06	1.3.2.20.06	Detektor logam
20	07	1.3.2.20.07	Rompi anti peluru
20	08	1.3.2.20.08	Pentungan
20	09	1.3.2.20.09	Helm
20	10	1.3.2.20.10	Alarm/sirene

20	11	1.3.2.20.11	Sentolop/senter
i1	08	1.3.2.i1.08	UPS/Stabilizer
00	00	1.3.3.00.00	Gedung dan Bangunan
01	00	1.3.3.01.00	Gedung kantor
01	01	1.3.3.01.01	Gedung kantor
02	00	1.3.3.02.00	Gedung rumah jabatan
02	01	1.3.3.02.01	Gedung rumah jabatan
03	00	1.3.3.03.00	Gedung rumah dinas
03	01	1.3.3.03.01	Gedung rumah dinas
04	00	1.3.3.04.00	Gedung gudang
04	01	1.3.3.04.01	Gedung gudang
05	00	1.3.3.05.00	Bangunan bersejarah
05	01	1.3.3.05.01	Bangunan bersejarah
06	00	1.3.3.06.00	Bangunan monumen
06	01	1.3.3.06.01	Bangunan monumen
07	00	1.3.3.07.00	Tugu peringatan
07	01	1.3.3.07.01	Tugu peringatan
00	00	1.3.4.00.00	Jalan, Jaringan dan instalasi
01	00	1.3.4.01.00	Jalan
01	01	1.3.4.01.01	Jalan
01	02	1.3.4.01.02	Jalan fly over
01	03	1.3.4.01.03	Jalan under pass
02	00	1.3.4.02.00	Jembatan
02	01	1.3.4.02.01	Jembatan gantung
02	02	1.3.4.02.02	Jembatan ponton
02	03	1.3.4.02.03	Jembatan penyebrangan orang
02	04	1.3.4.02.04	Jembatan penyebrangan diatas air
03	00	1.3.4.03.00	Jaringan Air
03	01	1.3.4.03.01	Jaringan irigasi/waduk/bendungan
03	02	1.3.4.03.02	Jaringan air bersih/air minum
03	03	1.3.4.03.03	Reservoir
03	04	1.3.4.03.04	Pintu air
04	00	1.3.4.04.00	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
04	01	1.3.4.04.01	Lampu hias jalan
04	02	1.3.4.04.02	Lampu hias taman
04	03	1.3.4.04.03	Lampu penerang hutan kota
05	00	1.3.4.05.00	Instalasi Listrik dan Telepon
05	01	1.3.4.05.01	Instalasi listrik
05	02	1.3.4.05.02	Jaringan telepon
00	00	1.3.5.00.00	Aset Tetap Lainnya
01	00	1.3.5.01.00	Buku dan Kepustakaan
01	01	1.3.5.01.01	Buku matematika
01	02	1.3.5.01.02	Buku fisika
01	03	1.3.5.01.03	Buku kimia
01	04	1.3.5.01.04	Buku biologi
01	05	1.3.5.01.05	Buku biografi
01	06	1.3.5.01.06	Buku geograf
01	07	1.3.5.01.07	Buku astronomi
01	08	1.3.5.01.08	Buku arkeologi
01	09	1.3.5.01.09	Buku bahasa dan sastra
01	10	1.3.5.01.10	Buku keagamaan
01	11	1.3.5.01.11	Buku sejarah
01	12	1.3.5.01.12	Buku seni dan budaya
01	13	1.3.5.01.13	Buku ilmu pengetahuan umum
01	14	1.3.5.01.14	Buku ilmu pengetahuan sosial
01	15	1.3.5.01.15	Buku ilmu politik dan ketatanegaraan
01	16	1.3.5.01.16	Buku ilmu pengetahuan dan teknologi
01	17	1.3.5.01.17	Buku ensiklopedia
01	18	1.3.5.01.18	Buku kamus bahasa
01	19	1.3.5.01.19	Buku ekonomi dan keuangan
01	20	1.3.5.01.20	Buku industri dan perdagangan
01	21	1.3.5.01.21	Buku peraturan perundang-undangan
01	22	1.3.5.01.22	Buku naskah
01	23	1.3.5.01.23	Terbitan berkala (jurnal Compact Disk)
01	24	1.3.5.01.24	Mikrofilm
01	25	1.3.5.01.25	Peta/atlas/globe
02	00	1.3.5.02.00	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
02	01	1.3.5.02.01	Lukisan/foto
02	02	1.3.5.02.02	Patung
02	03	1.3.5.02.03	Ukiran
02	04	1.3.5.02.04	Pahatan
02	05	1.3.5.02.05	Batu alam
02	06	1.3.5.02.06	Maket/miniatur/diorama
03	00	1.3.5.03.00	Hewan/Ternak dan Tanaman

03	01	1.3.5.03.01	Hewan kebun binatang
03	02	1.3.5.03.02	Temak
03	03	1.3.5.03.03	Tanaman
00	00	1.3.6.00.00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
01	00	1.3.6.01.00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
01	01	1.3.6.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan
00	00	1.3.7.00.00	Akumulasi Penyusutan
01	00	1.3.7.01.00	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
01	01	1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
00	00	1.4.0.00.00	DANA CADANGAN
00	00	1.4.1.00.00	Dana Cadangan
01	00	1.4.1.01.00	Dana Cadangan
01	01	1.4.1.01.01	Dana Cadangan
00	00	1.5.0.00.00	ASET LAINNYA
00	00	1.5.1.00.00	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
01	00	1.5.1.01.00	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor
01	01	1.5.1.01.01	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor
02	00	1.5.1.02.00	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah
02	01	1.5.1.02.01	Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah
00	00	1.5.2.00.00	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
01	00	1.5.2.01.00	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
01	01	1.5.2.01.01	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
00	00	1.5.3.00.00	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
01	00	1.5.3.01.00	Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT)
01	01	1.5.3.01.01	Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT)
02	00	1.5.3.02.00	Bangun serah guna (Build, Transfer and Operate/BTO)
02	01	1.5.3.02.01	Bangun serah guna (Build, Transfer and Operate/BTO)
03	00	1.5.3.03.00	Kerjasama Operasi (KSO)
03	01	1.5.3.03.01	Kerjasama Operasi (KSO)
00	00	1.5.4.00.00	Aset Tidak Berwujud
01	01	1.5.4.01.01	Aset Tidak Berwujud
00	00	1.5.5.00.00	Aset Lain-lain
01	00	1.5.5.01.00	Aset Lain-lain
01	01	1.5.5.01.01	Aset Lain-lain
00	00	2.0.0.00.00	KEWAJIBAN
00	00	2.1.0.00.00	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
00	00	2.1.1.00.00	Utang Perhitungan Pihak Ketiga
01	00	2.1.1.01.00	Utang Taspen
01	01	2.1.1.01.01	Utang Taspen
02	00	2.1.1.02.00	Utang Askes
02	01	2.1.1.02.01	Utang Askes
03	00	2.1.1.03.00	Utang PPh Pusat
03	01	2.1.1.03.01	Utang PPh Pusat
04	00	2.1.1.04.00	Utang PPN Pusat
04	01	2.1.1.04.01	Utang PPN Pusat
05	00	2.1.1.05.00	Utang Taperum
05	01	2.1.1.05.01	Utang Taperum
06	00	2.1.1.06.00	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
06	01	2.1.1.06.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
06	02	2.1.1.06.02	Iuran Wajib Pegawai
00	00	2.1.2.01.00	Utang Bunga
01	00	2.1.2.01.00	Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat
01	01	2.1.2.01.01	Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat
02	00	2.1.2.02.00	Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya
02	01	2.1.2.02.01	Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya
03	00	2.1.2.03.00	Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD
03	01	2.1.2.03.01	Utang Bunga kepada BUMN
03	02	2.1.2.03.02	Utang Bunga Kepada BUMD
04	01	2.1.2.04.01	Utang Bunga kepada Bank
04	00	2.1.2.04.00	Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan
04	02	2.1.2.04.02	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan
05	00	2.1.2.05.00	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
05	01	2.1.2.05.01	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
06	00	2.1.2.06.00	Utang Bunga Luar Negeri
06	01	2.1.2.06.01	Utang Bunga Luar Negeri
00	00	2.1.3.00.00	Utang Pajak
01	00	2.1.3.01.00	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
01	01	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
02	00	2.1.3.02.00	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22
02	01	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22
03	00	2.1.3.03.00	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
03	01	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
00	00	2.1.4.00.00	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
01	00	2.1.4.01.00	Utang Bank

01	01	2.1.4.01.01	Utang Bank
02	00	2.1.4.02.00	Utang Obligasi
02	01	2.1.4.02.01	Utang Obligasi
03	00	2.1.4.03.00	Utang Pemerintah Pusat
03	01	2.1.4.03.01	Utang Pemerintah Pusat
04	00	2.1.4.04.00	Utang Pemerintah Provinsi
04	01	2.1.4.04.01	Utang Pemerintah Provinsi
05	00	2.1.4.05.00	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
05	01	2.1.4.05.01	Utang Pemerintah Kabupaten
05	02	2.1.4.05.02	Utang Pemerintah Kota
00	00	2.1.5.00.00	Pendapatan Diterima Dimuka
01	00	2.1.5.01.00	Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III
01	01	2.1.5.01.01	Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III
02	00	2.1.5.02.00	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
02	01	2.1.5.02.01	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
03	00	2.1.5.03.00	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
03	01	2.1.5.03.01	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
00	00	2.1.6.00.00	Utang Jangka Pendek Lainnya
01	00	2.1.6.01.00	Utang Jangka Pendek Lainnya
01	01	2.1.6.01.01	Utang Jangka Pendek Lainnya
00	00	2.1.7.00.00	Utang BLUD
01	00	2.1.7.01.00	Utang BLUD
01	01	2.1.7.01.01	Utang Jasa Pelayanan / Jasa Kerja PNS
01	02	2.1.7.01.02	Utang Obat - Obatan
01	03	2.1.7.01.03	Utang Alat Kesehatan
01	04	2.1.7.01.04	Utang Telepon
01	05	2.1.7.01.05	Utang Air
01	06	2.1.7.01.06	Utang Listrik
01	07	2.1.7.01.07	Utang Surat Kabar/Majalah
01	08	2.1.7.01.08	Utang Makan dan Minum Harian Pasien
01	09	2.1.7.01.09	Utang Bahan Kimia
01	10	2.1.7.01.10	Utang Honor Pegawai Honoror/Tidak Tetap
00	00	2.2.0.00.00	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
00	00	2.2.1.00.00	Utang Dalam Negeri
01	00	2.2.1.01.00	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
01	01	2.2.1.01.01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
02	00	2.2.1.02.00	Utang Dalam Negeri - Obligasi
02	01	2.2.1.02.01	Utang Dalam Negeri - Obligasi
03	00	2.2.1.03.00	Utang Pemerintah Pusat
03	01	2.2.1.03.01	Utang Pemerintah Pusat
04	00	2.2.1.04.00	Utang Pemerintah Provinsi
04	01	2.2.1.04.01	Utang Pemerintah Provinsi
05	00	2.2.1.05.00	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
05	01	2.2.1.05.01	Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
00	00	2.2.2.00.00	Utang Luar Negeri
01	00	2.2.2.01.00	Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan
01	01	2.2.2.01.01	Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan
00	00	3.0.0.00.00	EKUITAS DANA
00	00	3.1.0.00.00	EKUITAS DANA LANCAR
00	00	3.1.1.00.00	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
01	00	3.1.1.01.00	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
01	01	3.1.1.01.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
00	00	3.1.2.00.00	Cadangan Piutang
01	00	3.1.2.01.00	Cadangan Piutang
01	01	3.1.2.01.01	Cadangan Piutang
00	00	3.1.3.00.00	Cadangan Persediaan
01	00	3.1.3.01.00	Cadangan Persediaan
01	01	3.1.3.01.01	Cadangan Persediaan
00	00	3.1.4.00.00	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
01	00	3.1.4.01.00	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
01	01	3.1.4.01.01	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
00	00	3.1.5.00.00	Pendapatan Diterima Dimuka
01	00	3.1.5.01.00	Pendapatan Diterima Dimuka
01	01	3.1.5.01.01	Pendapatan Diterima Dimuka
00	00	3.1.6.00.00	Uang Muka dari Kas Daerah
01	00	3.1.6.01.00	Uang Muka dari Kas Daerah
01	01	3.1.6.01.01	Uang Muka dari Kas Daerah
00	00	3.1.7.00.00	R/K Pemda
01	00	3.1.7.01.00	R/K Pemda
01	01	3.1.7.01.01	R/K Pemda
00	00	3.2.0.00.00	EKUITAS DANA INVESTASI
00	00	3.2.1.00.00	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
01	00	3.2.1.01.00	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
01	01	3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

00	00	3.2.2.00.00	Diinvestasikan dalam Aset Tetap
01	00	3.2.2.01.00	Diinvestasikan dalam Aset Tetap
01	01	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap
00	00	3.2.3.00.00	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)
01	00	3.2.3.01.00	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)
01	01	3.2.3.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)
00	00	3.2.4.00.00	Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
01	00	3.2.4.01.00	Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
01	01	3.2.4.01.01	Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
00	00	3.3.0.00.00	EKUITAS DANA CADANGAN
00	00	3.3.1.00.00	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
01	00	3.3.1.01.00	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
01	01	3.3.1.01.01	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan
00	00	3.4.0.00.00	Ekuitas Awal
00	00	3.4.1.00.00	Ekuitas Awal
01	00	3.4.1.01.00	Ekuitas Awal
01	01	3.4.1.01.01	Ekuitas Awal
00	00	3.5.0.00.00	Surplus dan Defisit Tahun Lalu
00	00	3.5.1.00.00	Surplus dan Defisit Tahun Lalu
01	00	3.5.1.01.00	Surplus dan Defisit Tahun Lalu
01	01	3.5.1.01.01	Surplus dan Defisit Tahun Lalu
00	00	3.6.0.00.00	Surplus dan Defisit Tahun Berjalan
00	00	3.6.1.00.00	Surplus dan Defisit Tahun Berjalan
01	00	3.6.1.01.00	Surplus dan Defisit Tahun Berjalan
01	01	3.6.1.01.01	Surplus dan Defisit Tahun Berjalan
00	00	3.7.0.00.00	Ekuitas Donasi
00	00	3.7.1.00.00	Ekuitas Donasi
01	00	3.7.1.01.00	Ekuitas Donasi
01	01	3.7.1.01.01	Ekuitas Donasi
00	00	4.0.0.00.00	PENDAPATAN DAERAH
00	00	4.1.0.00.00	Pendapatan Asli Daerah
00	00	4.1.1.00.00	Hasil Pajak Daerah
01	00	4.1.1.01.00	Pajak Hotel
01	01	4.1.1.01.01	Hotel Bintang Lima Berlian
01	02	4.1.1.01.02	Hotel Bintang Lima
01	03	4.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat
01	04	4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga
01	05	4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua
01	06	4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu
01	07	4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga
01	08	4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua
01	09	4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu
01	10	4.1.1.01.10	Motel
01	11	4.1.1.01.11	Cottage
01	12	4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
01	13	4.1.1.01.13	Wisma Pariwisata
02	00	4.1.1.02.00	Pajak Restoran
02	01	4.1.1.02.01	Restoran
02	02	4.1.1.02.02	Rumah Makan
02	03	4.1.1.02.03	Café
02	04	4.1.1.02.04	Kantin
02	05	4.1.1.02.05	Katering
03	00	4.1.1.03.00	Pajak Hiburan
03	01	4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop
03	02	4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
03	03	4.1.1.03.03	Kontes Kecantikan
03	04	4.1.1.03.04	Kontes Binaraga
03	05	4.1.1.03.05	Pameran
03	06	4.1.1.03.06	Diskotik
03	07	4.1.1.03.07	Karaoke
03	08	4.1.1.03.08	Klub Malam
03	09	4.1.1.03.09	Sirkus/Akrobat/Sulap
03	10	4.1.1.03.10	Permainan Biliar
03	11	4.1.1.03.11	Permainan Golf
03	12	4.1.1.03.12	Permainan Bowling
03	13	4.1.1.03.13	Pacuan Kuda
03	14	4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor
03	15	4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan
03	16	4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi
03	17	4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa
03	18	4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran
03	19	4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga
04	00	4.1.1.04.00	Pajak Reklame
04	01	4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron

04	02	4.1.1.04.02	Reklame Kain
04	03	4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker
04	04	4.1.1.04.04	Reklame Selebaran
04	05	4.1.1.04.05	Reklame Berjalan
04	06	4.1.1.04.06	Reklame Udara
04	07	4.1.1.04.07	Reklame Apung
04	08	4.1.1.04.08	Reklame Suara
04	09	4.1.1.04.09	Reklame Film/Slide
04	10	4.1.1.04.10	Reklame Peragaan
05	00	4.1.1.05.00	Pajak Penerangan Jalan
05	01	4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN
06	00	4.1.1.06.00	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
06	01	4.1.1.06.01	Asbes
06	02	4.1.1.06.02	Batu Tulis
06	03	4.1.1.06.03	Batu setengah permata
06	04	4.1.1.06.04	Batu Kapur
06	05	4.1.1.06.05	Batu Apung
07	00	4.1.1.07.00	Pajak Parkir
07	01	4.1.1.07.01	Pajak Parkir
08	00	4.1.1.08.00	Pajak Air Bawah tanah
08	01	4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah tanah
09	00	4.1.1.09.00	Pajak Sarang Burung Walet
09	01	4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet
10	00	4.1.1.10.00	Pajak Lingkungan
10	01	4.1.1.10.01	Pajak Lingkungan
00	00	4.1.2.00.00	Hasil Retribusi Daerah
01	00	4.1.2.01.00	Retribusi Jasa Umum
01	01	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan
01	02	4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
01	03	4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
01	04	4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
01	05	4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
01	06	4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar
01	07	4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
01	08	4.1.2.01.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
01	09	4.1.2.01.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
01	10	4.1.2.01.10	Retribusi Pelayanan Pendidikan
02	00	4.1.2.02.00	Retribusi Jasa Usaha
02	01	4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
02	02	4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
02	03	4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan
02	04	4.1.2.02.04	Retribusi Terminal
02	05	4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir
02	06	4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
02	07	4.1.2.02.07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
02	08	4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan
02	09	4.1.2.02.09	Retribusi Pelayanan Kepelembahan
02	10	4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
02	11	4.1.2.02.11	Retribusi Penyeberangan di Air
02	12	4.1.2.02.12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
02	13	4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
03	00	4.1.2.03.00	Retribusi Perizinan Tertentu
03	01	4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
03	02	4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
03	03	4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
03	04	4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek
03	05	4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan
00	00	4.1.3.00.00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
01	00	4.1.3.01.00	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
01	01	4.1.3.01.01	Perusahaan daerah
01	02	4.1.3.01.02	BUMD
02	00	4.1.3.02.00	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
02	01	4.1.3.02.01	BUMN
03	00	4.1.3.03.00	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
03	01	4.1.3.03.01	Perusahaan
00	00	4.1.4.00.00	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
01	00	4.1.4.01.00	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
01	01	4.1.4.01.01	Pelepasan Hak Atas Tanah
01	02	4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai
01	03	4.1.4.01.03	Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai
01	04	4.1.4.01.04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
01	05	4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua
01	06	4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
01	07	4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas

01	08	4.1.4.01.08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
01	09	4.1.4.01.09	Penjualan Lampu Hias Bekas
01	10	4.1.4.01.10	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan
01	11	4.1.4.01.11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
01	12	4.1.4.01.12	Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi
01	13	4.1.4.01.13	Penjualan hasil pertanian
01	14	4.1.4.01.14	Penjualan hasil kehutanan
01	15	4.1.4.01.15	Penjualan hasil perkebunan
01	16	4.1.4.01.16	Penjualan hasil peternakan
01	17	4.1.4.01.17	Penjualan hasil perikanan
01	18	4.1.4.01.18	Penjualan hasil sitaan
02	00	4.1.4.02.00	Penerimaan Jasa Giro
02	01	4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah
02	02	4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas
02	03	4.1.4.02.03	Jasa Giro Dana Cadangan
03	00	4.1.4.03.00	Pendapatan Bunga deposito
03	01	4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank
04	00	4.1.4.04.00	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
04	01	4.1.4.04.01	Kerugian Uang
04	02	4.1.4.04.02	Kerugian Barang
05	00	4.1.4.05.00	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
05	01	4.1.4.05.01	Penerimaan Komisi dari penempatan Kas Daerah
05	02	4.1.4.05.02	Penerimaan Potongan dari
05	03	4.1.4.05.03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari
06	00	4.1.4.06.00	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
06	01	4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan
06	02	4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan
06	03	4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum
06	04	4.1.4.06.04	Bidang Perumahan Rakyat
06	05	4.1.4.06.05	Bidang Penataan Ruang
06	06	4.1.4.06.06	Bidang Perencanaan Pembangunan
06	07	4.1.4.06.07	Bidang Perhubungan
06	08	4.1.4.06.08	Bidang Lingkungan Hidup
06	09	4.1.4.06.09	Bidang Pertanahan
07	00	4.1.4.07.00	Pendapatan Denda Pajak
07	01	4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel
07	02	4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran
07	03	4.1.4.07.03	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
07	04	4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame
07	05	4.1.4.07.05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
07	06	4.1.4.07.06	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
07	07	4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir
07	08	4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah
07	09	4.1.4.07.09	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
07	10	4.1.4.07.10	Pendapatan Denda Pajak Lingkungan
08	00	4.1.4.08.00	Pendapatan Denda Retribusi
08	01	4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
08	02	4.1.4.08.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
08	03	4.1.4.08.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu
09	00	4.1.4.09.00	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
09	01	4.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
09	02	4.1.4.09.02	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame
09	03	4.1.4.09.03	Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman
10	00	4.1.4.10.00	Pendapatan dari Pengembalian
10	01	4.1.4.10.01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
10	02	4.1.4.10.02	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan
10	03	4.1.4.10.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan
10	04	4.1.4.10.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas
10	05	4.1.4.10.05	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka
11	00	4.1.4.11.00	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
11	01	4.1.4.11.01	Fasilitas Sosial
11	02	4.1.4.11.02	Fasilitas Umum
12	00	4.1.4.12.00	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
12	01	4.1.4.12.01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk
12	02	4.1.4.12.02	Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan
12	03	4.1.4.12.03	Uang Ujian kenaikan tingkat/kelas
13	00	4.1.4.13.00	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rumah
13	01	4.1.4.13.01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah
13	02	4.1.4.13.02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan
14	00	4.1.4.14.00	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah
14	01	4.1.4.14.01	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
00	00	4.2.0.00.00	Dana Perimbangan
00	00	4.2.1.00.00	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
01	00	4.2.1.01.00	Bagi Hasil Pajak

01	01	4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
01	02	4.2.1.01.02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
01	03	4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi
02	00	4.2.1.02.00	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
02	01	4.2.1.02.01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
02	02	4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
02	03	4.2.1.02.03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
02	04	4.2.1.02.04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
02	05	4.2.1.02.05	Bagi Hasil dari Iuran-Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
02	06	4.2.1.02.06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
02	07	4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
02	08	4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
02	09	4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
02	10	4.2.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
00	00	4.2.2.00.00	Dana Alokasi Umum
01	01	4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum
01	02	4.2.2.01.02	Dana Alokasi Umum
00	00	4.2.3.00.00	Dana Alokasi Khusus
01	00	4.2.3.01.00	Dana alokasi khusus
01	01	4.2.3.01.01	Dana alokasi khusus
00	00	4.3.0.00.00	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
00	00	4.3.1.00.00	Pendapatan Hibah
01	00	4.3.1.01.00	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
01	01	4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
02	00	4.3.1.02.00	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya
02	01	4.3.1.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah
03	00	4.3.1.03.00	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri
03	01	4.3.1.03.01	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta
04	00	4.3.1.04.00	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan
04	01	4.3.1.04.01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan
05	00	4.3.1.05.00	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
05	01	4.3.1.05.01	Pendapatan Hibah Luar Negeri dari Bilateral
05	02	4.3.1.05.02	Pendapatan Hibah Luar Negeri dari Multilateral
05	03	4.3.1.05.03	Pendapatan Hibah Luar Negeri dari Donor lainnya
00	00	4.3.2.00.00	Dana Darurat
01	00	4.3.2.01.00	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
01	01	4.3.2.01.01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
00	00	4.3.3.00.00	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
01	00	4.3.3.01.00	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
01	01	4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
01	02	4.3.3.01.02	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air
01	03	4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
01	04	4.3.3.01.04	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
01	05	4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
01	06	4.3.3.01.06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
01	07	4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
02	00	4.3.3.02.00	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
02	01	4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
03	00	4.3.3.03.00	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
03	01	4.3.3.03.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
04	00	4.3.3.04.00	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
04	01	4.3.3.04.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
00	00	4.3.4.00.00	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
01	00	4.3.4.01.00	Dana Penyesuaian
01	01	4.3.4.01.01	Dana Penyesuaian
02	00	4.3.4.02.00	Dana Otonomi Khusus
02	01	4.3.4.02.01	Dana Otonomi Khusus
00	00	4.3.5.00.00	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
01	00	4.3.5.01.00	Bantuan keuangan dari provinsi
01	01	4.3.5.01.01	Bantuan keuangan dari Provinsi
02	00	4.3.5.02.00	Bantuan keuangan dari kabupaten
02	01	4.3.5.02.01	Bantuan keuangan dari Kabupaten
03	00	4.3.5.03.00	Bantuan keuangan dari kota
03	01	4.3.5.03.01	Bantuan keuangan dari Kota
00	00	5.0.0.00.00	BELANJA DAERAH
00	00	5.1.0.00.00	BELANJA TIDAK LANGSUNG
00	00	5.1.1.00.00	BELANJA PEGAWAI
01	00	5.1.1.01.00	Gaji dan Tunjangan
01	01	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
01	02	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga
01	03	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan
01	04	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional
01	05	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum
01	06	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras

01	07	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
01	08	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji
01	09	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan
01	10	5.1.1.01.10	Uang Paket
01	11	5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah
01	12	5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi
01	13	5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran
01	14	5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan
01	15	5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
01	16	5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan
01	17	5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas
01	18	5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian
02	00	5.1.1.02.00	Tambahan Penghasilan PNS
02	01	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
02	02	5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
02	03	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
02	04	5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
02	05	5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
03	00	5.1.1.03.00	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
03	01	5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
03	02	5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD
03	03	5.1.1.03.03	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
04	00	5.1.1.04.00	Biaya Pemungutan Pajak Daerah
04	01	5.1.1.04.01	Biaya pemungutan PBB
04	02	5.1.1.04.02	Biaya pemungutan Pajak Daerah
00	00	5.1.2.00.00	BELANJA BUNGA
01	00	5.1.2.01.00	Bunga Utang Pinjaman
01	01	5.1.2.01.01	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
01	02	5.1.2.01.02	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
01	03	5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
01	04	5.1.2.01.04	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
02	00	5.1.2.02.00	Bunga Utang Obligasi
02	01	5.1.2.02.01	Bunga Utang Obligasi
00	00	5.1.3.00.00	BELANJA SUBSIDI
01	00	5.1.3.01.00	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga
01	01	5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan
01	02	5.1.3.01.02	Belanja Subsidi kepada Lembaga
00	00	5.1.4.00.00	BELANJA HIBAH
01	00	5.1.4.01.00	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
01	01	5.1.4.01.01	Pemerintah Pusat
02	00	5.1.4.02.00	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
02	01	5.1.4.02.01	Pemerintah Daerah
03	00	5.1.4.03.00	Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa
03	01	5.1.4.03.01	Pemerintahan Desa
04	00	5.1.4.04.00	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN
04	01	5.1.4.04.01	Perusahaan Daerah/ BUMD/ BUMN
05	00	5.1.4.05.00	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
05	01	5.1.4.05.01	Badan/ lembaga/ organisasi swasta
06	00	5.1.4.06.00	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan
06	01	5.1.4.06.01	Kelompok masyarakat/ perorangan
00	00	5.1.5.00.00	BELANJA BANTUAN SOSIAL
01	00	5.1.5.01.00	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
01	01	5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
02	00	5.1.5.02.00	Belanja Bantuan Partai Politik
02	01	5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Partai Politik
00	00	5.1.6.00.00	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH
01	00	5.1.6.01.00	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi
01	01	5.1.6.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi
02	00	5.1.6.02.00	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
02	01	5.1.6.02.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
03	00	5.1.6.03.00	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
03	01	5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
04	00	5.1.6.04.00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
04	01	5.1.6.04.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
05	00	5.1.6.05.00	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
05	01	5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
00	00	5.1.7.00.00	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PE
01	00	5.1.7.01.00	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
01	01	5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
02	00	5.1.7.02.00	Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota
02	01	5.1.7.02.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
03	00	5.1.7.03.00	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
03	01	5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa...
04	00	5.1.7.04.00	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya

04	01	5.1.7.04.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi
04	02	5.1.7.04.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
04	03	5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa
00	00	5.1.8.00.00	BELANJA TIDAK TERDUGA
01	00	5.1.8.01.00	Belanja Tidak Terduga
01	01	5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga
00	00	5.2.0.00.00	BELANJA LANGSUNG
00	00	5.2.1.00.00	BELANJA PEGAWAI
01	00	5.2.1.01.00	Honorarium PNS
01	01	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
01	02	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
02	00	5.2.1.02.00	Honorarium Non PNS
02	01	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
02	02	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/tidak tetap
03	00	5.2.1.03.00	Uang Lembur
03	01	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS
03	02	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS
04	00	5.2.1.04.00	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
04	01	5.2.1.04.01	Belanja beasiswa tugas belajar D3
04	02	5.2.1.04.02	Belanja beasiswa tugas belajar S1
04	03	5.2.1.04.03	Belanja beasiswa tugas belajar S2
04	04	5.2.1.04.04	Belanja beasiswa tugas belajar S3
05	00	5.2.1.05.00	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
05	01	5.2.1.05.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
05	02	5.2.1.05.02	Belanja sosialisasi
05	03	5.2.1.05.03	Belanja bimbingan teknis
00	00	5.2.2.00.00	BELANJA BARANG DAN JASA
01	00	5.2.2.01.00	Belanja Bahan Pakai Habis
01	01	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor
01	02	5.2.2.01.02	Belanja dokumen/ administrasi tender
01	03	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batteray Kering)
01	04	5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya
01	05	5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
01	06	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
01	07	5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
01	08	5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas
02	00	5.2.2.02.00	Belanja Bahan/Material
02	01	5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan
02	02	5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman
02	03	5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak
02	04	5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan
02	05	5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia
03	00	5.2.2.03.00	Belanja Jasa Kantor
03	01	5.2.2.03.01	Belanja telepon
03	02	5.2.2.03.02	Belanja air
03	03	5.2.2.03.03	Belanja listrik
03	04	5.2.2.03.04	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
03	05	5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah
03	06	5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet
03	07	5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman
03	08	5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi
03	09	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
03	10	5.2.2.03.10	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
03	11	5.2.2.03.11	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
04	00	5.2.2.04.00	Belanja Premi Asuransi
04	01	5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
04	02	5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
05	00	5.2.2.05.00	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
05	01	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service
05	02	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang
05	03	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
05	04	5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR
05	05	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
05	06	5.2.2.05.06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
06	00	5.2.2.06.00	Belanja Cetak dan Penggandaan
06	01	5.2.2.06.01	Belanja cetak
06	02	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan
07	00	5.2.2.07.00	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
07	01	5.2.2.07.01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
07	02	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
07	03	5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
07	04	5.2.2.07.04	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
08	00	5.2.2.08.00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
08	01	5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

08	02	5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
08	03	5.2.2.08.03	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
09	00	5.2.2.09.00	Belanja Sewa Alat Berat
09	01	5.2.2.09.01	Belanja sewa Eskavator
09	02	5.2.2.09.02	Belanja sewa Buldoser
10	00	5.2.2.10.00	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
10	01	5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi
10	02	5.2.2.10.02	Belanja sewa komputer dan printer
10	03	5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor
10	04	5.2.2.10.04	Belanja sewa generator
10	05	5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda
10	06	5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
11	00	5.2.2.11.00	Belanja Makanan dan Minuman
11	01	5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
11	02	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat
11	03	5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu
12	00	5.2.2.12.00	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
12	01	5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
12	02	5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
12	03	5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
12	04	5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
12	05	5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
13	00	5.2.2.13.00	Belanja Pakaian Kerja
13	01	5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan
14	00	5.2.2.14.00	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
14	01	5.2.2.14.01	Belanja pakaian KORPRI
14	02	5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah
14	03	5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional
14	04	5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga
15	00	5.2.2.15.00	Belanja Perjalanan Dinas
15	01	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
15	02	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
16	00	5.2.2.16.00	Belanja Perjalanan Pindah Tugas
16	01	5.2.2.16.01	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
16	02	5.2.2.16.02	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah
17	00	5.2.2.17.00	Belanja Pemulangan Pegawai
17	01	5.2.2.17.01	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
17	02	5.2.2.17.02	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
17	03	5.2.2.17.03	Belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
00	00	5.2.3.00.00	BELANJA MODAL
01	00	5.2.3.01.00	Belanja Modal Pengadaan Tanah
01	01	5.2.3.01.01	Belanja modal Pengadaan tanah kantor
01	02	5.2.3.01.02	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit
01	03	5.2.3.01.03	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan puskesmas
01	04	5.2.3.01.04	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan poliklinik
01	05	5.2.3.01.05	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan taman kanak-kanak
01	06	5.2.3.01.06	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar
01	07	5.2.3.01.07	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan
01	08	5.2.3.01.08	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan
01	09	5.2.3.01.09	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan luar biasa/khusus
01	10	5.2.3.01.10	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus
01	11	5.2.3.01.11	Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti asuhan
01	12	5.2.3.01.12	Belanja modal Pengadaan tanah sarana sosial panti jompo
01	13	5.2.3.01.13	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum terminal
01	14	5.2.3.01.14	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum demaga
01	15	5.2.3.01.15	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum lapangan terbang perintis
01	16	5.2.3.01.16	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum rumah potong hewan
01	17	5.2.3.01.17	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pelelangan ikan
01	18	5.2.3.01.18	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pasar
01	19	5.2.3.01.19	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah
01	20	5.2.3.01.20	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman
01	21	5.2.3.01.21	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pusat hiburan rakyat
01	22	5.2.3.01.22	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum ibadah
01	23	5.2.3.01.23	Belanja modal Pengadaan tanah sarana stadion olahraga
01	24	5.2.3.01.24	Belanja modal Pengadaan tanah perumahan
01	25	5.2.3.01.25	Belanja modal Pengadaan tanah pertanian
01	26	5.2.3.01.26	Belanja modal Pengadaan tanah perkebunan
01	27	5.2.3.01.27	Belanja modal Pengadaan tanah perikanan
01	28	5.2.3.01.28	Belanja modal Pengadaan tanah peternakan
01	29	5.2.3.01.29	Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan
01	30	5.2.3.01.30	Belanja modal Pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan bak
02	00	5.2.3.02.00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
02	01	5.2.3.02.01	Belanja modal Pengadaan traktor
02	02	5.2.3.02.02	Belanja modal Pengadaan buldozer

02	03	5.2.3.02.03	Belanja modal Pengadaan stoom wals
02	04	5.2.3.02.04	Belanja modal Pengadaan eskavator
02	05	5.2.3.02.05	Belanja modal Pengadaan dump truk
02	06	5.2.3.02.06	Belanja modal Pengadaan crane
02	07	5.2.3.02.07	Belanja modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan
02	08	5.2.3.02.08	Belanja modal Pengadaan mesin pengolah semen
02	09	5.2.3.02.09	Belanja Modal Pengadaan Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis)
03	00	5.2.3.03.00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
03	01	5.2.3.03.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
03	02	5.2.3.03.02	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep
03	03	5.2.3.03.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon
03	04	5.2.3.03.04	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus
03	05	5.2.3.03.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
03	06	5.2.3.03.06	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
03	07	5.2.3.03.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air,Minyak,Tinja)
03	08	5.2.3.03.08	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor boks
03	09	5.2.3.03.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
03	10	5.2.3.03.10	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
03	11	5.2.3.03.11	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran
03	12	5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
03	13	5.2.3.03.13	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator
03	14	5.2.3.03.14	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangga berjalan
04	00	5.2.3.04.00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
04	01	5.2.3.04.01	Belanja modal Pengadaan gerobak
04	02	5.2.3.04.02	Belanja modal Pengadaan pedati/delman/dokar/bendi/cidomo/andong
04	03	5.2.3.04.03	Belanja modal Pengadaan becak
04	04	5.2.3.04.04	Belanja modal Pengadaan sepeda
04	05	5.2.3.04.05	Belanja modal Pengadaan karavan
05	00	5.2.3.05.00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor
05	01	5.2.3.05.01	Belanja modal Pengadaan kapal motor
05	02	5.2.3.05.02	Belanja modal Pengadaan kapal feri
05	03	5.2.3.05.03	Belanja modal Pengadaan speed boat
05	04	5.2.3.05.04	Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel
05	05	5.2.3.05.05	Belanja modal Pengadaan hydro foil
05	06	5.2.3.05.06	Belanja modal Pengadaan jet foil
05	07	5.2.3.05.07	Belanja modal Pengadaan kapal tug boat
05	08	5.2.3.05.08	Belanja modal Pengadaan kapal tanker
05	09	5.2.3.05.09	Belanja modal Pengadaan kapal kargo
06	00	5.2.3.06.00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor
06	01	5.2.3.06.01	Belanja modal Pengadaan perahu layar
06	02	5.2.3.06.02	Belanja modal Pengadaan perahu sampan
06	03	5.2.3.06.03	Belanja modal Pengadaan perahu tongkang
06	04	5.2.3.06.04	Belanja modal Pengadaan perahu karet
06	05	5.2.3.06.05	Belanja modal Pengadaan perahu rakit
06	06	5.2.3.06.06	Belanja modal Pengadaan perahu sekoci
07	00	5.2.3.07.00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara
07	01	5.2.3.07.01	Belanja modal Pengadaan pesawat kargo
07	02	5.2.3.07.02	Belanja modal Pengadaan pesawat penumpang
07	03	5.2.3.07.03	Belanja modal Pengadaan pesawat helikopter
07	04	5.2.3.07.04	Belanja modal pesawat pemadam kebakaran
07	05	5.2.3.07.05	Belanja modal Pengadaan pesawat capung
07	06	5.2.3.07.06	Belanja modal Pengadaan pesawat terbang ampibi
07	07	5.2.3.07.07	Belanja modal Pengadaan pesawat terbang layang
08	00	5.2.3.08.00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
08	01	5.2.3.08.01	Belanja modal Pengadaan mesin las
08	02	5.2.3.08.02	Belanja modal Pengadaan mesin bubut
08	03	5.2.3.08.03	Belanja modal Pengadaan mesin dongkrak
08	04	5.2.3.08.04	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor
09	00	5.2.3.09.00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
09	01	5.2.3.09.01	Belanja modal Pengadaan penggiling hasil pertanian
09	02	5.2.3.09.02	Belanja modal Pengadaan alat pengering gabah
09	03	5.2.3.09.03	Belanja modal Pengadaan mesin bajak
09	04	5.2.3.09.04	Belanja modal Pengadaan alat penetas
10	00	5.2.3.10.00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
10	01	5.2.3.10.01	Belanja modal Pengadaan mesin tik
10	02	5.2.3.10.02	Belanja modal Pengadaan mesin hitung
10	03	5.2.3.10.03	Belanja modal Pengadaan mesin stensil
10	04	5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy
10	05	5.2.3.10.05	Belanja modal Pengadaan mesin cetak
10	06	5.2.3.10.06	Belanja modal Pengadaan mesin jilid
10	07	5.2.3.10.07	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas
10	08	5.2.3.10.08	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas
10	09	5.2.3.10.09	Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik
10	10	5.2.3.10.10	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik

10	11	5.2.3.10.11	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran
11	00	5.2.3.11.00	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
11	01	5.2.3.11.01	Belanja modal Pengadaan meja gambar
11	02	5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari
11	03	5.2.3.11.03	Belanja modal Pengadaan brankas
11	04	5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filing kabinet
11	05	5.2.3.11.05	Belanja modal Pengadaan white board
11	06	5.2.3.11.06	Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu
12	00	5.2.3.12.00	Belanja Modal Pengadaan Komputer
12	01	5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
12	02	5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC
12	03	5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book
12	04	5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer
12	05	5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scanner
12	06	5.2.3.12.06	Belanja modal Pengadaan monitor/display
12	07	5.2.3.12.07	Belanja modal Pengadaan CPU
12	08	5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
12	09	5.2.3.12.09	
12	10	5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
13	00	5.2.3.13.00	Belanja Modal Pengadaan mebeulair
13	01	5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja
13	02	5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat
13	03	5.2.3.13.03	Belanja modal Pengadaan meja makan
13	04	5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja
13	05	5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat
13	06	5.2.3.13.06	Belanja modal Pengadaan kursi makan
13	07	5.2.3.13.07	Belanja modal Pengadaan tempat tidur
13	08	5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa
13	09	5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
14	00	5.2.3.14.00	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
14	01	5.2.3.14.01	Belanja modal Pengadaan tabung gas
14	02	5.2.3.14.02	Belanja modal Pengadaan kompor gas
14	03	5.2.3.14.03	Belanja modal Pengadaan lemari makan
14	04	5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan dispenser
14	05	5.2.3.14.05	Belanja modal Pengadaan kulkas
14	06	5.2.3.14.06	Belanja modal Pengadaan rak piring
14	07	5.2.3.14.07	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
15	00	5.2.3.15.00	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
15	01	5.2.3.15.01	Belanja modal Pengadaan lampu hias
15	02	5.2.3.15.02	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja
16	00	5.2.3.16.00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
16	01	5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera
16	02	5.2.3.16.02	Belanja modal Pengadaan handycam
16	03	5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor
17	00	5.2.3.17.00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
17	01	5.2.3.17.01	Belanja modal Pengadaan telepon
17	02	5.2.3.17.02	Belanja modal Pengadaan faximili
17	03	5.2.3.17.03	Belanja modal Pengadaan radio SSB
17	04	5.2.3.17.04	Belanja Modal Radio HF/FM (Handy Talkie)
17	05	5.2.3.17.05	Belanja modal Pengadaan radio VHF
17	06	5.2.3.17.06	Belanja modal Pengadaan radio UHF
17	07	5.2.3.17.07	Belanja modal Pengadaan alat sandi
18	00	5.2.3.18.00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
18	01	5.2.3.18.01	Belanja modal Pengadaan timbangan
18	02	5.2.3.18.02	Belanja modal Pengadaan teodolite
18	03	5.2.3.18.03	Belanja modal Pengadaan alat uji emisi
18	04	5.2.3.18.04	Belanja modal Pengadaan alat GPS
18	05	5.2.3.18.05	Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi
18	06	5.2.3.18.06	Belanja modal Pengadaan bejana ukur
18	07	5.2.3.18.07	Belanja modal Pengadaan barometer
18	08	5.2.3.18.08	Belanja modal Pengadaan seismograph
18	09	5.2.3.18.09	Belanja modal Pengadaan ultrasonograph
19	00	5.2.3.19.00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
19	01	5.2.3.19.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
19	02	5.2.3.19.02	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi
19	03	5.2.3.19.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT
19	04	5.2.3.19.04	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata
19	05	5.2.3.19.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah
19	06	5.2.3.19.06	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak
19	07	5.2.3.19.07	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan
19	08	5.2.3.19.08	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kulit dan kelamin
19	09	5.2.3.19.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi
19	10	5.2.3.19.10	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran neurologi
19	11	5.2.3.19.11	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi

19	12	5.2.3.19.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan
19	13	5.2.3.19.13	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi
19	14	5.2.3.19.14	Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis
20	00	5.2.3.20.00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
20	01	5.2.3.20.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi
20	02	5.2.3.20.02	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi
20	03	5.2.3.20.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia
20	04	5.2.3.20.04	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian
20	05	5.2.3.20.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan
20	06	5.2.3.20.06	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perkebunan
20	07	5.2.3.20.07	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan
20	08	5.2.3.20.08	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa
20	09	5.2.3.20.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
21	00	5.2.3.21.00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
21	01	5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan
21	02	5.2.3.21.02	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over
21	03	5.2.3.21.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan under pass
22	00	5.2.3.22.00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
22	01	5.2.3.22.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan gantung
22	02	5.2.3.22.02	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan ponton
22	03	5.2.3.22.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang
22	04	5.2.3.22.04	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air
23	00	5.2.3.23.00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
23	01	5.2.3.23.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi bendungan
23	02	5.2.3.23.02	Belanja modal Pengadaan konstruksi waduk
23	03	5.2.3.23.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
23	04	5.2.3.23.04	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal bawah tanah
23	05	5.2.3.23.05	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
23	06	5.2.3.23.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
23	07	5.2.3.23.07	Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir
23	08	5.2.3.23.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air
24	00	5.2.3.24.00	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
24	01	5.2.3.24.01	Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan
24	02	5.2.3.24.02	Belanja modal Pengadaan lampu hias taman
24	03	5.2.3.24.03	Belanja modal Pengadaan lampu penerang hutan kota
25	00	5.2.3.25.00	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
25	01	5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
25	02	5.2.3.25.02	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
26	00	5.2.3.26.00	Bangunan
26	01	5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
26	02	5.2.3.26.02	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
26	03	5.2.3.26.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
26	04	5.2.3.26.04	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
26	05	5.2.3.26.05	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah
26	06	5.2.3.26.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen
26	07	5.2.3.26.07	Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan
27	00	5.2.3.27.00	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
27	01	5.2.3.27.01	Belanja modal Pengadaan buku matematika
27	02	5.2.3.27.02	Belanja modal Pengadaan buku fisika
27	03	5.2.3.27.03	Belanja modal Pengadaan buku kimia
27	04	5.2.3.27.04	Belanja modal Pengadaan buku biologi
27	05	5.2.3.27.05	Belanja modal Pengadaan buku biografi
27	06	5.2.3.27.06	Belanja modal Pengadaan buku geografi
27	07	5.2.3.27.07	Belanja modal Pengadaan buku astronomi
27	08	5.2.3.27.08	Belanja modal Pengadaan buku arkeologi
27	09	5.2.3.27.09	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra
27	10	5.2.3.27.10	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan
27	11	5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan buku sejarah
27	12	5.2.3.27.12	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya
27	13	5.2.3.27.13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
27	14	5.2.3.27.14	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial
27	15	5.2.3.27.15	Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan
27	16	5.2.3.27.16	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi
27	17	5.2.3.27.17	Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia
27	18	5.2.3.27.18	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa
27	19	5.2.3.27.19	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan
27	20	5.2.3.27.20	Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan
27	21	5.2.3.27.21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
27	22	5.2.3.27.22	Belanja modal Pengadaan buku naskah
27	23	5.2.3.27.23	Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkala (Jurnal, Compact Disk)
27	24	5.2.3.27.24	Belanja modal Pengadaan mikrofilm
27	25	5.2.3.27.25	Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe
28	00	5.2.3.28.00	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
28	01	5.2.3.28.01	Belanja modal Pengadaan lukisan/foto

28	02	5.2.3.28.02	Belanja modal Pengadaan patung
28	03	5.2.3.28.03	Belanja modal Pengadaan ukiran
28	04	5.2.3.28.04	Belanja modal Pengadaan pahatan
28	05	5.2.3.28.05	Belanja modal Pengadaan batu alam
28	06	5.2.3.28.06	Belanja modal Pengadaan maket/miniatur/diorama
29	00	5.2.3.29.00	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
29	01	5.2.3.29.01	Belanja modal Pengadaan hewan kebun binatang
29	02	5.2.3.29.02	Belanja modal Pengadaan ternak
29	03	5.2.3.29.03	Belanja modal Pengadaan tanaman
30	00	5.2.3.30.00	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
30	01	5.2.3.30.01	Belanja modal Pengadaan senjata api
30	02	5.2.3.30.02	Belanja modal Pengadaan radar
30	03	5.2.3.30.03	Belanja modal Pengadaan mobil water canon
30	04	5.2.3.30.04	Belanja modal Pengadaan borgol
30	05	5.2.3.30.05	Belanja modal Pengadaan sangkur/bayonet
30	06	5.2.3.30.06	Belanja modal Pengadaan perisai/tameng
30	07	5.2.3.30.07	Belanja modal Pengadaan detektor logam
30	08	5.2.3.30.08	Belanja modal Pengadaan rompi anti peluru
30	09	5.2.3.30.09	Belanja modal Pengadaan pentungan
30	10	5.2.3.30.10	Belanja modal Pengadaan helm
30	11	5.2.3.30.11	Belanja modal Pengadaan alarm/sirene
30	12	5.2.3.30.12	Belanja modal Pengadaan sentolop/senter
00	00	6.0.0.00.00	PEMBIAYAAN DAERAH
00	00	6.1.0.00.00	Penerimaan Pembiayaan Daerah
00	00	6.1.1.00.00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
01	00	6.1.1.01.00	Pelampauan penerimaan PAD
01	01	6.1.1.01.01	Pajak Daerah
01	02	6.1.1.01.02	Retribusi Daerah
01	03	6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
01	04	6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang sah
02	00	6.1.1.02.00	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan
02	01	6.1.1.02.01	Bagi Hasil Pajak
02	02	6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
03	00	6.1.1.03.00	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
04	00	6.1.1.04.00	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
04	01	6.1.1.04.01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung
04	02	6.1.1.04.02	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung
04	03	6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa
04	04	6.1.1.04.04	Belanja Modal
04	05	6.1.1.04.05	Belanja Bunga
04	06	6.1.1.04.06	Belanja Subsidi
04	07	6.1.1.04.07	Belanja Hibah
04	08	6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial
04	09	6.1.1.04.09	Belanja Belanja Bagi Hasil
04	10	6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan
04	11	6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga
05	00	6.1.1.05.00	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
05	01	6.1.1.05.01	Uang jaminan
05	02	6.1.1.05.02	Potongan Taspen
05	03	6.1.1.05.03	Potongan Beras
05	04	6.1.1.05.04	Askes
06	00	6.1.1.06.00	Kegiatan lanjutan
06	01	6.1.1.06.01	Kegiatan lanjutan
00	00	6.1.2.00.00	Pencairan Dana Cadangan
01	00	6.1.2.01.00	Pencairan Dana Cadangan
01	01	6.1.2.01.01	Pencairan Dana Cadangan nomor
00	00	6.1.3.00.00	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
01	00	6.1.3.01.00	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD
01	01	6.1.3.01.01	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD
02	00	6.1.3.02.00	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
00	00	6.1.4.00.00	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
01	00	6.1.4.01.00	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
01	01	6.1.4.01.01	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
02	00	6.1.4.02.00	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain
02	01	6.1.4.02.01	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain
03	00	6.1.4.03.00	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank
03	01	6.1.4.03.01	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank
04	00	6.1.4.04.00	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank
04	01	6.1.4.04.01	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank
05	00	6.1.4.05.00	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah
05	01	6.1.4.05.01	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah atas nama
05	02	6.1.4.05.02	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah nomor
01	00	6.1.5.01.00	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
01	01	6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman

00	00	6.1.6.00.00	Penerimaan piutang daerah
01	00	6.1.6.01.00	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah
01	01	6.1.6.01.01	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah
01	02	6.1.6.01.02	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah
01	03	6.1.6.01.03	Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah
02	00	6.1.6.02.00	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
02	01	6.1.6.02.01	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah
03	00	6.1.6.03.00	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain
03	01	6.1.6.03.01	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain
04	00	6.1.6.04.00	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank
04	01	6.1.6.04.01	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank
05	00	6.1.6.05.00	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank
05	01	6.1.6.05.01	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank
00	00	6.2.0.00.00	Pengeluaran Pembiayaan Daerah
00	00	6.2.1.00.00	Pembentukan Dana Cadangan
01	00	6.2.1.01.00	Pembentukan Dana Cadangan
01	01	6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan nomor
00	00	6.2.2.00.00	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
01	00	6.2.2.01.00	Badan usaha milik pemerintah (BUMN)
01	01	6.2.2.01.01	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah di BUMN
02	00	6.2.2.02.00	Badan usaha milik daerah (BUMD)
02	01	6.2.2.02.01	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah di BUMD
03	00	6.2.2.03.00	Badan usaha milik swasta
03	01	6.2.2.03.01	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah di swasta
00	00	6.2.3.00.00	Pembayaran Pokok Utang
01	00	6.2.3.01.00	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
01	01	6.2.3.01.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
02	00	6.2.3.02.00	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah daerah lain
02	01	6.2.3.02.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah daerah lain
03	00	6.2.3.03.00	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank
03	01	6.2.3.03.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank
04	00	6.2.3.04.00	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
04	01	6.2.3.04.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank
05	00	6.2.3.05.00	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
05	01	6.2.3.05.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
06	00	6.2.3.06.00	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah lain
06	01	6.2.3.06.01	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah lain
07	00	6.2.3.07.00	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank
07	01	6.2.3.07.01	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank
08	00	6.2.3.08.00	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga keuangan bukan bank
08	01	6.2.3.08.01	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga keuangan bukan bank
09	00	6.2.3.09.00	Pelunasan Obligasi daerah pada saat jatuh tempo
09	01	6.2.3.09.01	Pembelian kembali obligasi atas nama
09	02	6.2.3.09.02	Pembelian kembali obligasi nomor
10	00	6.2.3.10.00	Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo
10	01	6.2.3.10.01	Obligasi atas nama
10	02	6.2.3.10.02	Obligasi nomor
00	00	6.2.4.00.00	Pemberian Pinjaman Daerah
01	00	6.2.4.01.00	Pemberian Pinjaman daerah kepada Pemerintah
01	01	6.2.4.01.01	Pemberian Pinjaman daerah kepada Pemerintah
02	00	6.2.4.02.00	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lain
02	01	6.2.4.02.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lain
00	00	6.3.0.00.00	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
00	00	6.3.1.00.00	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
01	00	6.3.1.01.00	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
01	01	6.3.1.01.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
00	00	7.0.0.00.00	PENDAPATAN
00	00	7.1.0.00.00	PENDAPATAN BLUD
00	00	7.1.1.00.00	Pendapatan Operasional
01	00	7.1.1.01.00	Tindakan Operatif
01	01	7.1.1.01.01	Tindakan Operatif - Jamkesmas
01	02	7.1.1.01.02	Tindakan Operatif - Umum
01	03	7.1.1.01.03	Tindakan Operatif - Askes
01	04	7.1.1.01.04	Tindakan Operatif - Jamkesda
01	05	7.1.1.01.05	Tindakan Operatif - Dana Pendamping
01	06	7.1.1.01.06	Tindakan Operatif - Jamsostek
03	00	7.1.1.03.00	Rawat Inap
03	01	7.1.1.03.01	Rawat Inap - Jamkesmas
03	02	7.1.1.03.02	Rawat Inap - Umum
03	03	7.1.1.03.03	Rawat Inap - Askes
03	04	7.1.1.03.04	Rawat Inap - Jamkesda
03	05	7.1.1.03.05	Rawat Inap - Dana Pendamping
03	06	7.1.1.03.06	Rawat Inap - Jamsostek
03	06	7.1.1.03.07	Akomodasi

03	06	7.1.1.03.08	Administrasi
03	06	7.1.1.03.09	Konsultasi
03	06	7.1.1.03.10	Visite
03	06	7.1.1.03.11	Tindakan Medis
03	06	7.1.1.03.12	Tindakan Keperawatan
03	06	7.1.1.03.13	Penunjang
03	06	7.1.1.03.14	Obat/Alkes
02	00	7.1.1.02.00	Rawat Jalan
02	01	7.1.1.02.01	Rawat Jalan - Jamkesmas
02	02	7.1.1.02.02	Rawat Jalan - Umum
02	03	7.1.1.02.03	Rawat Jalan - Askes
02	04	7.1.1.02.04	Rawat Jalan - Jamkesda
02	05	7.1.1.02.05	Rawat Jalan - Dana Pendamping
02	06	7.1.1.02.06	Rawat Jalan - Jamsostek
02	06	7.1.1.02.07	Karcis
02	06	7.1.1.02.08	Pemeriksaan
02	06	7.1.1.02.09	Konsultasi
02	06	7.1.1.02.10	Tindakan
02	06	7.1.1.02.11	Penunjang
02	06	7.1.1.02.12	Obat/Alkes
04	00	7.1.1.04.00	IGD
04	01	7.1.1.04.01	IGD - Jamkesmas
04	02	7.1.1.04.02	IGD - Umum
04	03	7.1.1.04.03	IGD - Askes
04	04	7.1.1.04.04	IGD - Jamkesda
04	05	7.1.1.04.05	IGD - Dana Pendamping
04	06	7.1.1.04.06	IGD - Jamsostek
04	06	7.1.1.04.07	Karcis
04	06	7.1.1.04.08	Pemeriksaan
04	06	7.1.1.04.09	Konsultasi
04	06	7.1.1.04.10	Tindakan
04	06	7.1.1.04.11	Penunjang
04	06	7.1.1.04.12	Obat/Alkes
05	00	7.1.1.05.00	Jaspel
05	01	7.1.1.05.01	Jaspel - Jamkesmas
05	02	7.1.1.05.02	Jaspel - Umum
05	03	7.1.1.05.03	Jaspel - Askes
05	04	7.1.1.05.04	Jaspel - Jamkesda
05	05	7.1.1.05.05	Jaspel - Dana Pendamping
05	06	7.1.1.05.06	Jaspel - Jamsostek
06	00	7.1.1.06.00	BBA
06	01	7.1.1.06.01	BBA - Jamkesmas
06	01	7.1.1.06.01	BBA - Umum
06	01	7.1.1.06.01	BBA - Askes
06	01	7.1.1.06.01	BBA - Jamkesda
06	01	7.1.1.06.01	BBA - Dana Pendamping
06	01	7.1.1.06.01	BBA - Jamsostek
07	00	7.1.1.07.00	Ambulance
07	01	7.1.1.07.01	Ambulance - Jamkesmas
07	02	7.1.1.07.02	Ambulance - Umum
07	03	7.1.1.07.03	Ambulance - Askes
07	04	7.1.1.07.04	Ambulance - Jamkesda
07	05	7.1.1.07.05	Ambulance - Dana Pendamping
07	06	7.1.1.07.06	Ambulance - Jamsostek
08	00	7.1.1.08.00	Jenazah
08	01	7.1.1.08.01	Jenazah - Jamkesmas
08	02	7.1.1.08.02	Jenazah - Umum
08	03	7.1.1.08.03	Jenazah - Askes
08	04	7.1.1.08.04	Jenazah - Jamkesda
08	05	7.1.1.08.05	Jenazah - Dana Pendamping
08	06	7.1.1.08.06	Jenazah - Jamsostek
09	00	7.1.1.09.00	Laboratorium
09	01	7.1.1.09.01	Laboratorium - Jamkesmas
09	02	7.1.1.09.02	Laboratorium - Umum
09	03	7.1.1.09.03	Laboratorium - Askes
09	04	7.1.1.09.04	Laboratorium - Jamkesda
09	05	7.1.1.09.05	Laboratorium - Dana Pendamping
09	06	7.1.1.09.06	Laboratorium - Jamsostek
10	00	7.1.1.10.00	Obat
10	01	7.1.1.10.01	Obat - Jamkesmas
10	02	7.1.1.10.02	Obat - Umum
10	03	7.1.1.10.03	Obat - Askes
10	04	7.1.1.10.04	Obat - Jamkesda
10	05	7.1.1.10.05	Obat - Dana Pendamping

10	06	7.1.1.10.06	Obat - Jamsostek
11	00	7.1.1.11.00	Radiologi
11	01	7.1.1.11.01	Radiologi - Jamkesmas
11	02	7.1.1.11.02	Radiologi - Umum
11	03	7.1.1.11.03	Radiologi - Askes
11	04	7.1.1.11.04	Radiologi - Jamkesda
11	05	7.1.1.11.05	Radiologi - Dana Pendamping
11	06	7.1.1.11.06	Radiologi - Jamsostek
12	00	7.1.1.12.00	Pendapatan Lain - Lain dan Parkir
12	01	7.1.1.12.01	Parkir
99	00	7.1.1.99.00	Penyesuaian Kontraktual
99	01	7.1.1.99.01	Penyesuaian Kontraktual
00	00	7.2.0.00.00	Pendapatan Operasional Lainnya
00	00	7.2.1.00.00	Pendapatan Operasional Lainnya
01	00	7.2.1.01.00	Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian
01	01	7.2.1.01.01	Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian
00	00	7.2.2.00.00	Pendapatan Hibah Operasional
01	00	7.2.2.01.00	Hibah Terikat
01	01	7.2.2.01.01	Hibah Terikat
02	00	7.2.2.02.00	Hibah Tidak Terikat
02	01	7.2.2.02.01	Hibah Tidak Terikat
00	00	7.2.3.00.00	Droping Dana
01	00	7.2.3.01.00	Droping Dana APBD
01	01	7.2.3.01.01	Alokasi Dana APBD-Operasional
01	02	7.2.3.01.02	Alokasi Dana APBD-Investasi
00	00	7.2.4.00.00	Hasil Usaha Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
01	00	7.2.4.01.00	Hasil Usaha Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
01	01	7.2.4.01.01	Hasil Usaha Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
00	00	7.3.0.00.00	Pendapatan Non Operasional
00	00	7.3.1.00.00	Pendapatan Non Operasional
01	00	7.3.1.01.00	Hasil Penjualan Kekayaan yang Tidak Dipisahkan
01	01	7.3.1.01.01	Hasil Penjualan Kekayaan yang Tidak Dipisahkan
02	00	7.3.1.02.00	Hasil Pemanfaatan Kekayaan
02	01	7.3.1.02.01	Hasil Pemanfaatan Kekayaan
02	02	7.3.1.02.02	Hasil Pemanfaatan Kekayaan
03	00	7.3.1.03.00	Pendapatan Jasa giro
03	01	7.3.1.03.01	Pendapatan Jasa giro
04	00	7.3.1.04.00	Pendapatan bunga
04	01	7.3.1.04.01	Pendapatan bunga
05	00	7.3.1.05.00	Pendapatan Selisih Nilai Tukar
05	01	7.3.1.05.01	Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
06	00	7.3.1.06.00	Pendapatan Komisi dan Potongan
06	01	7.3.1.06.01	Komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan
00	00	8.0.0.00.00	Biaya BLUD
00	00	8.1.0.00.00	Biaya Operasional
00	00	8.1.1.00.00	Biaya Pelayanan
01	00	8.1.1.01.00	Biaya pegawai
01	01	8.1.1.01.01	Biaya pegawai
02	00	8.1.1.02.00	Biaya bahan
02	01	8.1.1.02.01	Biaya bahan
03	00	8.1.1.03.00	Biaya jasa pelayanan
03	01	8.1.1.03.01	Biaya jasa pelayanan
04	00	8.1.1.04.00	Biaya pemeliharaan
04	01	8.1.1.04.01	Biaya pemeliharaan
05	00	8.1.1.05.00	Biaya Penyusutan
05	00	8.1.1.05.01	Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan
05	00	8.1.1.05.02	Biaya Penyusutan Peralatan dan Mesin
05	00	8.1.1.05.03	Biaya Penyusutan Jalan, Irigasi dan Mesin
05	00	8.1.1.05.04	Biaya Penyusutan Aset Tetap Lainnya
05	01	8.1.1.05.01	Biaya barang dan jasa
06	00	8.1.1.06.00	Biaya pelayanan lain-lain
06	01	8.1.1.06.01	Biaya pelayanan lain-lain
00	00	8.1.2.00.00	Biaya Umum dan Administrasi
01	00	8.1.2.01.00	Biaya pegawai
01	01	8.1.2.01.01	Biaya pegawai
02	00	8.1.2.02.00	Biaya Administrasi Kantor
02	01	8.1.2.02.01	Biaya Administrasi Kantor
03	00	8.1.2.03.00	Biaya Pemeliharaan
03	01	8.1.2.03.01	Biaya Pemeliharaan
04	00	8.1.2.04.00	Biaya Barang dan Jasa
04	01	8.1.2.04.01	Biaya Barang dan Jasa
05	00	8.1.2.05.00	Biaya Promosi
05	01	8.1.2.05.01	Biaya Promosi
06	00	8.1.2.06.00	Biaya Umum dan Administrasi Lainnya

06	01	8.1.2.06.01	Biaya Umum dan Administrasi Lainnya
00	00	8.1.3.00.00	Biaya Lain-lain
01	00	8.1.3.01.00	Biaya Bunga
01	01	8.1.3.01.01	Biaya Bunga
02	00	8.1.3.02.00	Biaya Administrasi Bank
02	01	8.1.3.02.01	Biaya Administrasi Bank
03	00	8.1.3.03.00	Biaya Lain-lain
03	01	8.1.3.03.01	Biaya Lain-lain
03	12	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perawatan Peralatan Kantor
03	13	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Perawatan Peralatan Kerja
03	14	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Kebersihan

BUPATI LAMONGAN

FADELI